



**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KRISIS  
POLITIK DI MADAGASKAR TAHUN 2009  
(*VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN MADAGASCAR'S  
POLITICAL CRISIS ON 2009*)**

**SKRIPSI**

Oleh

**TEFISO FIANJINA  
NIM 100910101078**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2014**



**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KRISIS**

**POLITIK DI MADAGASKAR TAHUN 2009**

***(VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN MADAGASCAR'S***

***POLITICAL CRISIS ON 2009)***

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**TEFISO FIANJINA**  
**NIM 100910101078**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**2014**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda FIANJINA dan Ibunda RAZAFINDRAVAO Florisette yang tercinta
2. Kakakku RANIAINA H. Fianjina dan adikku AVOTRAIGNE T. Fianjina
3. Almamater Universitas Jember

## MOTO

“We can be of many nations, but earth is our land. We can be of many races, but we are just one clan.”<sup>1</sup>

Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. (Kolose 3:23)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>*Human rights Quote* by Ricardo Derose

<sup>2</sup>Lembaga Alkitab Indonesia. 1989. *Alkitab*. Bogor: Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia.

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :Tefiso Fianjina

NIM :100910101078

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: “**Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Krisis Politik di Madagaskar Tahun 2009**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun,dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,20 Mei 200014

Yang menyatakan,

Tefiso Fianjina  
NIM 100910101078

**SKRIPSI**

**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KRISIS POLITIK DI  
MADAGASKAR TAHUN 2009**

Oleh

**TEFISO FIANJINA**

**NIM 100910101078**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. M. Nur Hasan, M.Hum

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Supriyadi, M.Si

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Krisis Politik di Madagaskar tahun 2009” telah diuji dan disahkan pada:

hari : Senin  
tanggal : 28 April 2014  
waktu : 11:00 WIB  
tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

TimPenguji:  
Ketua

Dra. Sri Yuniati, M.Si  
NIP 196305261989022001

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. M.Nur Hasan, M.Hum  
NIP 195904231987021001

Drs. Supriyadi, M.Si  
NIP 195803171985031003

Anggota I

Anggota II

Drs. Alfani Jamil, M.Si  
NIP 195004081976031001

Suyani Indriastuti, S.Sos. M.Si  
NIP 197701052008012013

Mengesahkan,  
Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.  
NIP 195207271981031003

## RINGKASAN

**Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Krisis Politik Di Madagaskar Tahun 2009**  
; TefisoFianjina, 100910101078; 2014; 125 halaman, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Krisis Politik yang ada di Madagaskar pada tahun 2009 yaitu perebutan kekuasaan antar Presiden Marc Ravalomanana dan Walikota Antananarivo Andry Rajoelina mengakibatkan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia selama tahun 2009. Faktor pemicu krisis ini adalah berangkat dari kebijakan pemerintah Marc Ravalomanana yang juga hal tersebut sebagai faktor pemicu demonstrasi dan beberapa kekerasan yang akhirnya melahirkan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius di Madagaskar pada tahun 2009. Namun demikian pelanggaran tersebut telah berlanjut setelah runtuhnya pemerintah Marc Ravalomanana pada bulan Maret 2009 dan itu dipimpin oleh Presiden Transisi Andry Rajoelina. Pelanggaran Hak Asasi Manusia berlanjut hingga sampai akhir tahun 2009.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut penulis menganalisis data yang ada sehingga mendapatkan jawaban atas pelanggaran HAM yang terjadi dalam krisis politik di Madagaskar tahun 2009.

Hasil penelitian yang diambil dari skripsi ini adalah bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Madagaskar pada tahun 2009 yang paling serius dalam sejarah Madagaskar dan juga di mata internasional. Pelanggaran tersebut adalah berbentuk melanggar hak untuk hidup serta keamanan diri manusia, pelanggaran hak kebebasan, pelanggaran hak untuk mengeluarkan pendapat dan kebebasan mengutarakan pikiran dan perasaan, pelanggaran hak untuk mendapatkan jaminan sosial serta hak untuk mendapatkan hak milik atas benda. Dari berbagai bentuk pelanggaran HAM yang telah ditemukan maka penulis dapat menarik bahwa Madagaskar telah mengalami kegagalan dalam menghormati HAM pada tahun 2009 sekaligus melanggar beberapa pernyataan dalam UDHR 1948 sehingga dinyatakan pelanggaran HAM yang serius.



## PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Krisi Politik di Madagaskar Tahun 2009**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dra. Sri Yuniati , M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional sekaligus ketua penguji.
2. Suyani Indriastusi, S.Sos. M. Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional sekaligus penguji anggota II.
3. Drs. M. Nur Hasan, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, serta memberikan kritik dan saran, selama penulisan skripsi ini.
4. Drs. Supriyadi, M. Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi.
5. Drs. Alfian Jamil, M. Si sebagai penguji anggota I
6. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis selama menempuh masa studi.
7. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian skripsi ini;
8. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan semangat,doa dan kasih sayangnya demi terselesaikannya skripsi ini;
9. Teman-teman Jurusan Ilmu Hubungan Internasional 2010 yang telah memberikan kesan, bantuan, persahabatan dalam suka dan duka;
10. dan semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih banyak.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 20 Mei 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Ruang Lingkup Pembahasan</b>	
1.2.1 Batasan Materi .....	5
1.2.2 Batasan Waktu .....	6
<b>1.3 Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>1.4 Tujuan Penulisan</b> .....	7
<b>1.5 Kerangka Pemikiran</b>	
1.5.1 Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) .....	12
<b>1.6 Argumen Utama</b> .....	14
<b>1.7 Metode Penelitian</b>	
1.7.1 Metode Pengumpulan Data .....	15
1.7.2 Metode Analisa Data .....	15
<b>1.8 Sistematika Penulisan</b> .....	16

<b>BAB 2. GAMBARAN UMUM MADAGASKAR</b>	
<b>2.1 Kondisi Geografis Madagaskar</b> .....	17
<b>2.2 Sejarah Madagaskar</b>	
2.2.1 Asal Usul .....	19
2.2.2 Persatuan Madagaskar .....	20
2.2.3 Penjajahan oleh Perancis .....	20
2.2.4 Kemerdekaan .....	21
<b>2.3 Sistem Politik dan Pemerintahan Madagaskar</b>	
2.3.1 Badan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif .....	23
2.3.2 Sejarah Singkat militer di Madagaskar .....	26
<b>BAB 3. KRISIS POLITIK DI MADAGASKAR TAHUN 2009</b>	
<b>3.1. Kondisi politik di Madagaskar pada tahun 2009</b> .....	28
<b>3.2. Kebijakan Pemerintah Marc Ravalomanana sebagai faktor         munculnya krisis politik</b>	
3.2.1. Kebijakan di bidang Politik.....	31
3.2.2. Kebijakan di Bidang Ekonomi.....	36
3.2.3. Kebijakan di bidang Pers.....	41
3.2.4. Kebijakan di bidang Militer.....	42
<b>3.3. Munculnya Pihak oposisi</b>	
3.3.1 Protes masyarakat Madagaskar.....	44
3.3.2 Keterlibatan militer.....	44
<b>3.4 Krisis Politik tahun 2009</b> .....	45
<b>BAB 4. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI MADAGASKAR PADA TAHUN 2009</b>	
<b>4.1 Perkembangan HAM di Madagaskar</b>	
4.1.1 Hak Asasi Manusia dalam konstitusi .....	49
4.1.2 Pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama sebagai manusia hidup di dunia .....	50

## **4.2 Bentuk-bentuk pelanggaran HAM**

4.2.1 Pelanggaran hak untuk hidup serta keamanan diri manusia dan Pelanggaran hak kebebasan .....	54
4.2.2 Pelanggaran hak untuk mengeluarkan pendapat dan kebebasan mengutarakan pikiran dan perasaan .....	61
4.2.3 Pelanggaran hak untuk mendapatkan jaminan sosial serta hak untuk mendapatkan hak milik benda .....	67

## **BAB 5 Kesimpulan**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
1.1 Jenis-jenis HAM dalam UDHR .....	10
2.2 Kronologi Nama-nama Presiden yang telah memimpin Madagaskar.....	21
3.1 Daftar Partai Politik terlibat dalam krisis politik di Madagaskar tahun 2009 .....	30
3.2 Partai di Parlemen Madagaskar Tahun 2002 dan pada tahun 2007.....	35
3.3 Jet Prices .....	36
3.4 Hutan luar negeri (milliards US\$).....	40
4.1 Pelanggaran hak untuk hidup serta keamanan diri manusia dan Pelanggaran hak kebebasan .....	55
4.2 Pelanggaran hak untuk mengeluarkan pendapat dan kebebasan mengutarakan pikiran dan perasaan .....	62
4.4 Persentase pelanggaran HAM.....	66
4.5 Pelanggaran hak untuk mendapatkan jaminan sosial serta hak untuk mendapatkan hak milik benda .....	67

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
3.1 Alur Pemikiran.....	30
4.1 Grafik pelanggaran HAM tahun 2009.....	66

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
I. Peta Madagaskar .....	79
II. Gambar tentang pelanggaran HAM.....	81
III. Konstitusi Madagaskar.....	84
IV. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.....	118



## DAFTAR SINGKATAN

HAM: Hak Asasi Manusia

UDHR: Universal Declaration of Human Rights

APBN: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBD: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

ACAT: Action des Chretiens pour l'Abolition de la Torture

CNDH: Conseil National des Droits Humains

CNMDDH: Comite National de Defense de Droit de l'Homme

TIM: Tiako I Madagasikara

TGV: Tanora Gasy Vonona

FAP: Forces Armees Populaires

GMM: Grand Magasin de Madagascar

SADC: Sourhern African Development Community

MAP: Madagascar Action Plan

MBS: Madagascar Broadcasting System

AS: Amerika Serikat

## **BAB 1.**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sejak berakhirnya “Perang Dingin”<sup>1</sup> akhir tahun 1980an, isu Hak Asasi Manusia (HAM) atau “*human rights*”<sup>2</sup> menjadi perdebatan hangat dalam politik global. Hal ini tidak berarti bahwa dalam periode sebelumnya isu Hak Asasi Manusia tidak diperhatikan, tetapi isu keamanan nasional dan internasional lebih mendominasi percaturan politik dunia sehingga negara menjadi aktor utama dan unit analisis. Doktrin hak asasi manusia adalah mencerminkan bahwa setiap orang adalah subjek perhatian global. Setiap orang memiliki Hak Asasi Manusia, dan tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak asasi. Pada prinsipnya, menghubungkan batas-batas politik dan sosial di seluruh dunia Internasional.<sup>3</sup> Pasca perang dingin, hampir setiap negara di seluruh wilayah dunia pada setiap tingkat perkembangan memungkinkan keterlibatan mereka untuk melindungi Hak-Hak Asasi Manusia. Semakin meluasnya liberalisasi dan demokratisasi politik maka semakin banyak pemerintahan yang didesak di dalam negeri maupun luar negeri untuk melindungi HAM. Di dunia internasional menilai suatu pola pelanggaran kasar atas Hak-Hak Asasi Manusia yang berlangsung terus menerus secara luas dianggap menggerogoti keabsahan sebuah rezim baik secara nasional maupun internasional. Hak asasi manusia telah menjadi suatu pokok

---

<sup>1</sup> Secara resmi apa yang dikenal sebagai Perang Dingin berakhir pada 1989-1990 dengan runtuhnya Tembok Berlin pada 9 November 1989 serta menyatunya Jerman Barat dan Jerman Timur pada 3 Oktober 1990. Perkembangan itu disusul dengan bubarnya Uni Soviet pada 25 Desember 1991 bersamaan dengan mundurnya Mikhail Gorbachev sebagai kepala negara. Juwono Sudarsono, 1996 “State of the Art Hubungan Internasional: Mengkaji Ulang Teori Hubungan Internasional,” dalam Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan Jakarta: Pustaka Jaya, hal. 3

<sup>2</sup> *Human Rights* atau Hak asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan.

<sup>3</sup> Charles R. Beitz, 2009 *The Idea of Human Rights*, Oxford University Press Inc., New York.

mantap dalam hubungan-hubungan internasional baru selama setengah abad dan menjadi bahasan utama di negara-negara dunia.<sup>4</sup>

Manusia yang hidup pada akhir abad ke-20 berhadapan dengan serangkaian kecenderungan yang unik yaitu dunia yang cepat berubah menuju globalisasi, tetapi sekaligus juga terpecah menjadi bagian kecil, teknologi informasi yang semakin canggih, kemudahan yang lebih luas untuk menggapai dunia lewat kemampuan komunikasi, dan pelanggaran HAM secara terus-menerus dan tindakan kekerasan terhadap perseorangan dan kelompok di banyak kawasan. Oleh karena itu lahirlah “*Universal Declaration of Human Rights*” (UDHR). UDHR adalah sebuah dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mempertegas kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius masih dilakukan pemerintah sehingga hal tersebut ditetapkan dan diakui sebagai suatu masalah internasional. Eksistensi konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia tidak otomatis menjamin penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia karena berbagai macam dan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia masih saja terjadi. Berbagai pelanggaran HAM yang disebabkan oleh krisis politik masih dilakukan oleh pemerintah misalnya di Bosnia, Rwanda dan di “Madagaskar”<sup>5</sup>. Kemiskinan yang melanda benua Afrika seringkali disebabkan karena konflik domestik yang terjadi dalam Negara itu sendiri. Kompleksitas sebuah konflik dapat membentuk ketidakstabilan *human security* (keamanan manusia). Seringkali konflik merusak infrastruktur Negara tersebut dan mengganggu aktivitas ekonomi. Hal ini juga terjadi di Madagaskar selama krisis politik pada tahun 2009.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> George Clack 1998“ *Introduction to human rights*” US information agency , Hak hak asasi manusia sebagai masalah Internasional”, hal 7

<sup>5</sup> Madagaskar adalah sebuah pulau yang terletak di Samudera Hindia Barat, terletak di 425 km lepas pantai timur Afrika Selatan. Meskipun letaknya adalah terpisah dengan Afrika tapi tetap masuk dalam benua Afrika. Malagasy adalah bahasa nasional Madagaskar dan penduduk Madagaskar dipanggil orang “Malagasy”.

<sup>6</sup> Herbert F Spirer dan Louise Spirer,1993.*Data analysis for monitoring human rights*. ITB Bandung hl 11a

Delegasi “*Amnesty International*”<sup>7</sup> telah mengunjungi Madagaskar pada bulan Juni 2009 dan melakukan penyelidikan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang serius di Madagaskar sejak bulan Desember tahun 2008. Di samping itu juga, *Human security report* melaporkan pada 11 maret 2010 bahwa Madagaskar telah mengalami pelanggaran HAM yang buruk dalam sejarah Madagaskar yaitu pada tahun 2009. Pelanggaran tersebut terjadi di bawah pemerintahan Presiden Ravalomanana yang kemudian di lanjutkan pemimpin transisi Andry Rajoelina. Pelanggaran HAM yang paling menonjol dilakukan pemerintah Marc Ravalomanana.<sup>8</sup> Dua presiden tersebut telah memimpin Madagaskar pada tahun 2009. Presiden Marc Ravalomanana telah melanggar HAM dibuktikan dengan penembakan para demonstran oleh penjaga istana presiden. Di mana semua penembakan itu diperintah oleh presiden yang berkuasa. Hal tersebut melanggar hak untuk hidup dan hak keselamatan individu. Juga terlihat dengan penyewaan lahan subur rakyat kepada perusahaan asing (Industry Korea selatan) yang bernama Daewoo. Industri Daewoo menyewa tanah lahan subur seluas 1,3 juta hektar dalam 99 tahun.<sup>9</sup> Hal tersebut melanggar hak untuk mendapatkan hak milik atas tanah milik rakyat, di mana pada waktu itu perekonomian rakyat hancur bahkan tingkat pengangguran pada waktu itu naik. 65% penduduk sudah terancam kelaparan. Hal tersebut menyebabkan penduduk Malagasy tidak percaya lagi terhadap pemerintah. Munculah pihak oposisi terhadap tindakan tersebut. Sebagian besar dari masyarakat Madagaskar setuju dengan pihak oposisi dan munculah demonstrasi-demonstrasi yang bertujuan

---

<sup>7</sup>*AmnestyInternational* adalah sebuah organisasi non-pemerintah internasional dengan tujuan mempromosikan seluruh HAM yang terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan standar internasional lainnya.

<sup>8</sup> Krisis politik di Madagaskar dimulai pada Desember 2008, ketika pemerintah Ravalomanana menutup TV Viva (milik Walikota Rajoelina) karena dianggap menyampaikan pidato yang tidak sah oleh mantan Presiden Ratsiraka( Presiden sebelum Ravalomanana). Pemerintah menyatakan bahwa pidato mengancam akan "mengganggu ketertiban umum dan keamanan". Walikota tersebut menjadi pemimpin pihak oposisi dan mengulingkan pemerintahan Ravalomanana hingga sampai terjadinya kudeta pada bulan Maret 2009. Selama krisis tersebut, pelanggaran HAM yang serius terjadi di Madagaskar bahkan setelah kudeta yang dipimpin oleh Rajoelina, masih saja terjadi pelanggaran HAM.

<sup>9</sup>Anonim. tanpa tahun. *Collectif pour la défense des terres malgaches- Affaire Daewoo* (Perlindungan tanah milik Negara dalam kasus Daewoo) diakses dari <http://terresmalgaches.info/spip.php?article1>; Chido Makunike [ pada tanggal 4 september 2013]

untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Marc Ravalomanana.<sup>10</sup> Beberapa pelanggaran juga seperti pelanggaran hak kebebasan, hak berkumpul, hak untuk mendapatkan informasi yang telah terlangar pada pemerintahan Ravalomanana. Pelanggaran-pelanggaran yang telah dipaparkan di atas menghasilkan Andry Rajoelina temengguling pemerintah Ravalomana pada bulan Maret 2009. Andry Rajoelina menjadi presiden transisi pada pertengahan Maret 2009. Pun demikian, pelanggaran HAM tetap berlanjut. Setelah runtuhnya pemerintahan Ravalomanana, pendukung pemerintah tersebut berkumpul untuk menggulingkan Andry Rajoelina dari kekuasaannya. Hal tersebut dilakukan karena Andry Rajoelina dianggap mengambil ahli secara tidak sah atau melalui “kudeta”. Para pendukung Ravalomanan ditangkap atau dibom oleh pihak keamanan transisi. Pihak transisi telah melanggar HAM yaitu hak untuk berkumpul sehingga para pendukung Ravalomana ditangkap atau ditembak luka jika melakukan demonstran. Selama ketegangan antar dua pihak pemerintah yang berkuasa, posisi militer pada waktu itu sudah pecah menjadi dua yaitu mengikuti pendukung Andry Rajoelina (sebagai pihak oposisi pemerintahan) dan pendukung Marc Ravalomanana. Namun, setelah militer digunakan oleh pemerintah Ravalomanana untuk menekan protes dan mengakibatkan kematian, pemimpin militer tampaknya semakin bersandar ke arah mendukung Rajoelina.

Peristiwa pertama adalah terjadi pada Senin 26 Januari 2009.

Para jurnalis sebagai saksi mata menyatakan bahwa:

*“Andry Rajoelina n'a donné aucun ordre d'incendier les locaux de la Rnm et de la Tvm. Il s'agit de la manifestation de la justice populaire, lorsque le peuple souverain n'a plus confiance aux institutions actuelles.”*<sup>11</sup>

Menurut jurnalis dalam bahasa Indonesia menyatakan bahwa “Andry Rajoelina tidak memberi perintah untuk membakar gedung Stasiun Radio Negara dan menyerbu stasiun televisi pribadi milik mantan Presiden Ravalomanana. Ini

<sup>10</sup> Peter Benenson House ,2010” *Madagascar: urgent need for justice, human right violations during the political crisis*”Amnesty international publication.

<sup>11</sup>Anonim. tanpa tahun. Madagate News, Antananarivo, 26 janvier 2009: *la vérité historique* (Hal yang benar terjadi) [diakses pada tanggal 4 september 2013] Dari <http://www.madagate.com/reportages/manifestation/2940-antananarivo-26-janvier-2009-la-verite-historique.html>

adalah manifestasi dari pengadilan rakyat, ketika rakyat berdaulat tidak lagi percaya kepada lembaga tersebut”.

Peristiwa lainnya yang menunjukkan adanya pelanggaran HAM yaitu pada 7 February 2009. Pengawal kepresidenan menembak demonstran. Hal ini mendorong Menteri Pertahanan untuk mengundurkan diri sebagai protes. Kerusuhan tersebut merupakan hal yang lebih ekstrim di Madagaskar. Demonstrasi dari ke dua pihak bertentangan berlangsung.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan singkat dan fakta-fakta di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Madagascar pada tahun 2009. Oleh sebab itu penulis mengambil judul: **“PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KRISIS POLITIK DI MADAGASKAR PADA TAHUN 2009”**

## **1.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

Dalam mengalisi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Madagaskar pada tahun 2009, penulis membatasi penelitian yang diteliti. Batasan tersebut adalah:

### **1.2.1 Batasan Materi**

Batasan Materi diperlukan agar materi yang dibahas fokus pada bahasan utama dalam karya ilmiah oleh karena itu penulis mengambil obyek pembahasan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran HAM di Madagascar dalam krisis politik tahun 2009. Penulis juga akan membahas tentang sejarah dan Perkembangan HAM di Madagascar.

### **1.2.2 Batasan Waktu**

Batasan waktu merupakan periode tertentu yang dibahas dalam suatu kasus yang dianalisis. Batasan waktu diperlukan agar ada kejelasan tentang

---

<sup>12</sup> Anonim. tanpa tahun. *Oposisi dan pemerintah masih bersitegang*'' diakses dari <http://internasional.kompas.com/read/2009/01/28/0511134/Oposisi.dan.Pemerintah.Masih.Bersitegang> [pada tanggal 4 September 2013]

fenomena. Maka rentang waktu yang dianalisis adalah pada Januari 2009 di mana pelanggaran HAM mulai hingga pada Maret 2010 di mana *'Human Right Report'*<sup>13</sup> melaporkan bahwa Madagaskar telah mengalami pelanggaran HAM yang serius pada tahun 2009. Selain itu untuk membantu penelitian ini, penulis juga akan menyertakan beberapa sejarah dan data di masa lampau yang berkaitan dengan pokok bahasan.

### 1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan adalah hal penting yang mendasari seseorang untuk meneliti dan menuliskan hasil penelitiannya dalam bentuk karya ilmiah. Perumusan masalah diperlukan untuk memberikan arah terhadap tujuan penulisan sehingga penulisan karya ilmiah akan lebih fokus pada permasalahan dan ruang lingkup pembahasan yang telah ditentukan. Sehingga dapat ditentukan bahwa rumusan masalah yang digunakan adalah: **“Apa bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Madagascar dalam krisis politik tahun 2009?”**.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia di Madagaskar pada tahun 2009.

### 1.5 Kerangka Pemikiran

Teori merupakan sarana bagi penulis dalam menyajikan pembahasan yang lebih runut dan ilmiah. Kerangka pemikiran dapat berupa teori, konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli sosial. Menurut Charles Mac Clelland, teori adalah

---

<sup>13</sup> *Human Rights Report* adalah satu lembaga dalam Departemen luar negeri Amerika Serikat (AS), *United States department of state* adalah salah satu lembaga yang melapor situasi hak asasi manusia di seluruh dunia termasuk Madagascar dan "Departemen Luar Negeri diciptakan pada 1789"<sup>13</sup> Departemen Luar Negeri ini didirikan oleh kongre dan dipimpin oleh Sekretaris Negara, yang merupakan penasihat atas ke presiden pada urusan luar negeri. dimana tujuannya adalah untuk menangani hubungan luar negeri bangsa. Dalam pernyataan misi saat ini, departemen mendefinisikan diplomasi sebagai instrumen kekuasaan yang ssential untuk keamanan nasional. *Human right report* ini menegaskan adanya pelanggaran hak azasi manusia di Madagaskar pasca krisis politik tahun 2009. Dari <http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/af/135962.htm> [ diakses pada tanggal 5 september 2013 ].

merupakan kerangka dasar untuk mengatur fakta, pernyataan mengenai keadaan yang diharapkan, pikiran yang spekulatif dan abstraksi.<sup>14</sup>

Dalam menganalisis fenomena pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Madagaskar , kerangka pemikiran yang digunakan adalah “konsep HAM”.

### 1.5.1 Konsep HAM

Ide dasar tentang HAM sudah sejak lama menjadi perdebatan. Konsep dasar tentang HAM didukung dari beberapa konsep dan sudut pandang. Secara manusiawi, HAM dipahami sebagai hak-hak yang melekat dengan harkat dan hakikat kemanusiaan kita. Hak-hak tersebut tidak memandang apa pun latar belakang ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia atau pekerjaan kita.<sup>15</sup> Pemahaman itulah yang melatarbelakangi konsep modern tentang HAM seperti berikut:

*Human Rights could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings.*<sup>16</sup>

Artinya, secara umum HAM adalah disimpulkan sebagai hak yang melekat dengan kodrat manusia yang bila tidak ada, mustahil kita akan dapat hidup sebagai manusia. Dengan pemahaman seperti itu, konsep HAM disifatkan sebagai *common standard of achievement*( standar pencapai bersama) di mana sebagai tolok ukur bersama tentang prestasi kemanusiaan yang perlu dicapai oleh seluruh masyarakat baik nasional maupun internasional. Hal tersebut tercantum dalam alinea 8 Preamble dari *The Universal Declaration of Human Rights*(UDHR) 1948 yang menyatakan bahwa: “*Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all*

---

<sup>14</sup> Charles Mac Clelland, 1986, Ilmu Hubungan Internasional, Teori dan system, , Jakarta Rajawali Press, hl 187

<sup>15</sup> Saafroedin, 1996, Hak Asasi Manusia, Analisis Komnas HAM dan Jaringan Hankam/ABRI. Pustaka Sinar Harapan, hl 6

<sup>16</sup> United Nations. 1987.. *Human Rights, Questions and answers*. New York, hl 4.



*nations.....*”<sup>17</sup>.UDHR merupakan pernyataan umum mengenai martabat yang melekat dan kebebasan serta persamaan manusia yang harus ada pada pengertian Hak Asasi Manusia. Deklarasi tersebut merupakan dokumen tertulis pertama tentang HAM yang diterima semua bangsa. Disebut sebagai dokumen tertulis pertama tentang HAM yang berlaku universal karena banyak dokumen tertulis mengenai HAM lahir sebelum deklarasi ini, namun dokumen-dokumen tersebut tidak pernah dimufakati oleh semua bangsa sebagai dokumen HAM yang bersifat universal.<sup>18</sup>

Semua teori agama merujuk pada kehendak Tuhan atau suatu tatanan dunia ilahi. Para penganut Stoa zaman Yunani dan Romawi melacak hak-hak itu sampai ke “hukum alam”. Spinoza dan Wolf mengasalkannya pada akal murni. Jean Jacques Rousseau menanggapi HAM dalam istilah *natural rights*. Konsep HAM sebagai *Natural Rights* yang dianut oleh Rousseau ini adalah dimaksudkan sebagai hak yang keberadaannya ada sejak dalam keadaan alamiah. Dia menyatakan bahwa keadaan alamiah manusia itu makhluk yang baik, masyarakatlah yang membuatnya jahat. Oleh karena itu, keadaan alamiah manusia adalah individu yang bebas. Dari pandangan Rousseau ini, kemudian muncul konsep bahwa HAM sebagai jaminan manusia sebagai makhluk yang bebas sebagai hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hal itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat/negara berperan sebagai penjamin kebebasan.<sup>19</sup>

Dilihat dari perkembangan HAM, maka konsep hak asasi manusia mencakup generasi I, II, III, dan pendekatan struktural. Generasi I konsep HAM , sarat dengan hak-hak yuridis, seperti tidak disiksa dan ditahan, hak akan *equality*

---

<sup>17</sup> United Nations General Assembly 10 Desember 1948, UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS DARI <http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b1udhr.htm>[diakses pada tanggal 4 September 2013]

<sup>18</sup>Johannes Morsink.1999. *The Universal Declaration of Human Rights*” University of Pennsylvania Philadelphia

<sup>19</sup> Robert Haas dan Eros Djarot. 1996.*Human Rights and The Media*.Yayasan Obor Indonesia Jakarta,hl 13

*before the law* (persamaan dihadapan hukum), hak akan *fair trial* (peradilan yang jujur), praduga tak bersalah dan sebagainya. Generasi I ini merupakan reaksi terhadap kehidupan kenegaraan yang totaliter dan fasistis yang mewarnai tahun-tahun sebelum Perang Dunia II. Generasi II konsep HAM, merupakan perluasan secara horizontal generasi I, sehingga konsep HAM mencakup juga bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Generasi II, merupakan terutama sebagai reaksi bagi negara dunia ketiga yang telah memperoleh kemerdekaan dalam rangka mengisi kemerdekaannya setelah Perang Dunia II. Generasi III konsep HAM, merupakan ramuan dari hak hukum, sosial, ekonomi, politik dan budaya menjadi apa yang disebut hak akan pembangunan (*the right to development*). Hak asasi manusia di nilai sebagai totalitas yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Dengan demikian, hak asasi manusia sekaligus menjadi satu masalah antar disiplin yang harus didekati secara interdisipliner. Pendekatan struktural (melihat akibat kebijakan pemerintah yang diterapkan) dalam hak asasi manusia seharusnya merupakan generasi IV dari konsep HAM. Karena dalam realitas masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia cenderung merupakan akibat kebijakan yang tidak berpihak pada hak asasi manusia. Misalnya, berkembangnya sistem sosial yang memihak ke atas dan memelaratkan mereka yang dibawah, suatu pola hubungan yang "*repressive*". Sebab jika konsep ini tidak dikembangkan, maka yang kita lakukan hanya memperbaiki gejala, bukan penyakit. Dan perjuangan hak asasi manusia akan berhenti sebagai pelampiasan emosi (*emotional outlet*).<sup>20</sup>

Dalam UDHR hak -hak yang dapat dirasakan adalah dapat dibagi dalam dua macam. Secara rinci kita lihat dalam tabel berikutnya.

---

<sup>20</sup>Tim ICCE.2008. *Pendidikan Kewargaan(Civic Education): Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, UIN Jakarta*

**Tabel 1 .1 Ringkasan jenis-jenis HAM dalam UDHR:**

<b>Hak-hak Sipil dan Politik</b>	<b>Hak-hak Ekonomi dan Sosial</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak untuk Hidup</li> <li>- Hak kebebasan</li> <li>- Hak keamanan pribadi</li> <li>- Hak partisipasi politik</li> <li>- Hak milik atas benda</li> <li>- Hak berkumpul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak bekerja</li> <li>- Hak untuk mendapatkan kehidupan yang pantas</li> <li>- Hak pendidikan</li> <li>- Hak kebebasan hidup berbudaya</li> </ul>

Sumber: Leah Levin,1981.Human Rights Questions and answers.Plantu Unesco .hl 8

Dari tabel yang telah dipaparkan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa semua hak-hak yang dapat dirasakan sudah tercantum dalam UDHR. Dalam UDHR hak-hak ini adalah dibagi yaitu pasal 3 sampai pasal 21 mengenai hak- hak sipil dan politik dan pasal 22 sampai pasal 30 mengenai hak-hak ekonomi dan sosial.

Eleanor Roosevelt adalah sebagai salah satu pencetus dokumen PBB. Dia juga sebagai ketua Komisi ketika dokumen UDHR itu disusun. Dia adalah peneliti UDHR ini. Eleanor Roosevelt juga adalah ketua pertama komisi PBB untuk hak-hak asasi manusia. Dalam kedudukannya itu, Eleanor memainkan peran penting dalam menyusun deklarasi umum tentang hak-hak asasi manusia.

*“Where after all do universal human rights begin? In small places, closes to home - so close and so small that they cannot be seen on any map of the world. Yet they are the world of the individual person: The neighborhood he lives in; the school or college he attends; the factory, farm or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Without concerted citizen action to*

*uphold them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world.*<sup>21</sup>

Di sini menyatakan bahwa HAM adalah sangat penting dimana kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dengan HAM. Oleh karena itu dengan adanya UDHR adalah sangat istimewa nilainya untuk perlindungan HAM yang setara.

*“The Universal Declaration of Human Rights - This great and inspiring instrument was born of an increased sense of responsibility by the international community for the promotion and protection of man’s basic rights and freedoms. The world has come to a clear realization of the fact that freedom, justice and world peace can only be assured through the international promotion and protection of these rights and freedoms”.*<sup>22</sup>

Kutipan diatas mencerminkan bahwa masalah HAM sudah menjadi masalah global karena bisa dikatakan sulit ditangani tanpa bantuan internasional. Oleh karena itu adanya UDHR sangat membantu untuk mengurangi masalah pelanggaran HAM di mana dunia internasional sangat berperan dalam deklarasi tersebut.

Madagaskar adalah salah satu anggota PBB yang menandatangani Deklarasi Universal tersebut pada tanggal 18 Desember 1967 dan telah meratifikasi pada 07 Februari 1969. Bangsa Madagaskar sebagai anggota PBB mempunyai tanggungjawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut. Bahwa perumusan Hak Asasi Manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat dan martabat diri manusia itu sendiri. Bangsa Madagaskar memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya ,sesama manusia dan lingkungannya. Bangsa Madagaskar pada hakikatnya menyadari, mengakui dan menjamin serta menghormati hak asasi manusia orang lain juga sebagai kewajiban. Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia

---

<sup>21</sup>Eleanor Roosevelt March 27, 1958. *Human rights Quotations* as Remarks at the United Nations. Eleanor Roosevelt adalah seorang tokoh kemanusiaan Amerika Serikat dan istri presiden Franklin Roosevelt. Setelah suaminya meninggal dalam tahun 1946, ia terpilih menjadi ketua pertama komisi PBB untuk hak-hak asasi manusia. Dari <http://www.gwu.edu/~erpapers/abouteleanor/er-quotes> [diakses pada tanggal 5 september 2013]

<sup>22</sup>Third United Nations Secretary-General, 1961-1971 dari <http://www.un.org> [diakses pada tanggal 5 september 2013]

dan kewajiban asasi manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga negara, serta anggota masyarakat bangsa bangsa.<sup>23</sup>

Penulis akan menggunakan beberapa pernyataan dalam UDHR untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di Madagaskar di antaranya:

**a- Pelanggaran hak untuk hidup dan keamanan diri manusia serta hak kebebasan yang terjadi di Madagaskar yaitu terkait dengan beberapa pasal diantaranya pasal 1, pasal 3, dan pasal 19.**

Terjadinya penembakan oleh militer terhadap para demonstran anti-pemerintah di Madagaskar telah melanggar pasal-pasal tersebut. Demikian juga penembakan terhadap seorang reporter hingga tewas pada tanggal 7 Februari 2009 oleh pengawal presiden di bawah pimpinan Presiden Marc Ravalomanana. Berikut adalah pasal-pasal yang terkait dengan kejadian tersebut.

**Article 1:** “*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood*”<sup>24</sup>. (Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan).

**Article 3:** “*Everyone has the right to life, liberty and security of person*” (Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu).<sup>25</sup>

**Article 19 :** “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.*” (Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan

---

<sup>23</sup>Anonim. tanpa tahun. CONVENTIONS INTERNATIONALES RELATIVES AUX DROITS DE L'HOMME (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK ASASI MANUSIA) , Etat des engagements des pays membres de la Francophonie (Komitmen negara negara anggota Francophon) Dari <http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/8.pdf> [ diakses pada 5 september 2013]

<sup>24</sup>Susan Muaddi Darra.2010. *The Universal Declaration of Human Rights*,Chelsea House.

<sup>25</sup>*Ibid.*

informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)).

**b. Pelanggaran hak untuk mengeluarkan pendapat serta kebebasan mengutarakan pikiran dan perasaan yaitu terkait dengan pasal 21 dan pasal 9**

Di Madagaskar, beberapa orang sipil maupun politisi ditangkap dan dipenjarakan jika tidak sepaham dengan pemerintah . Hal tersebut terkait dengan pasal-pasal berikutnya yaitu:

**Article 21** : 1. “ *Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives*”.(Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas).

**Article 9**. “*No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.*”(Tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang).

**c. Pelanggaran hak untuk mendapatkan jaminan sosial serta hak untuk mendapatkan hak milik atas benda yaitu terkait dengan pasal 17 dan 22**

Pelanggaran tersebut terjadi di Madagaskar karena pemerintah mengambil tanah rakyat secara tidak sah demi keuntungan pribadi serta penggunaan uang rakyat oleh Presiden. Di mana kejadian itu terkait dengan pasal-pasal berikut ini yaitu:

**Article 17** :1. “*Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.*(Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain).

*No one shall be arbitrarily deprived of his property.*”

(Tak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan semena-mena).

**Article 22** : “*Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.*”( Setiap orang, sebagai anggota

masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak melaksanakan dengan perantaraan usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional, dan sesuai dengan organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari setiap Negara, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya).

HAM adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak orang dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam UDHR. Dalam kaitannya dengan itu, Madagaskar telah mengalami kegagalan dalam menghormati HAM dan melanggar pernyataan dalam UDHR. Pun demikian bukan berarti semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini yang terjadi pelanggaran di Madagaskar tetapi hanya beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut meliputi hak-hak politik, hak-hak sipil, hak-hak ekonomi.

## **1.6 Argumen Utama**

Dari kerangka pemikiran dan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mencoba mengemukakan argument sebagai berikut “bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Madagascar adalah: Pelanggaran hak untuk hidup serta keamanan diri manusia dan pelanggaran hak kebebasan, pelanggaran hak untuk mengeluarkan pendapat dan kebebasan mengutarakan pikiran dan perasaan, pelanggaran hak untuk mendapatkan jaminan sosial serta hak untuk mendapatkan hak milik benda.

## **1.7 Metode penelitian**

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dan metode analisis data dalam meneliti masalah pelanggaran HAM di Madagaskar tahun 2009. Metode tersebut yaitu:

### **1.7.1 Metode pengumpulan data**

Dalam karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka yaitu dengan melihat, mengutip dan

memelajari buku, majalah, bulletin, surat kabar, laporan-laporan, dokumen, situs internet, dan catatan penting lainnya.

Penulis memperoleh data-data yang relevan dengan pembahasan karya ilmiah dalam penelitian ini yaitu berasal dari:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
3. Buku dan Jurnal Ilmiah
4. Majalah, surat kabar dan media cetak lainnya
5. Situs-situs Internet dan materi perkuliahan

### **1.7.2 Metode Analisa data**

Analisa data bertujuan untuk menyederhanakan permasalahan sehingga mudah ditafsirkan. Dalam penulisan ini, karena data yang terkumpul tidak dapat diukur secara langsung, maka data tersebut diolah secara dekuantitatif-kualitatif.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Metode kualitatif adalah metode penelitian melalui pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. Dengan penerapan metode kualitatif tersebut, data yang dikumpulkan kemudian adalah data deskriptif yang berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hasil penelitian yang dikemukakan pun nantinya akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian hasil penelitian.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Mohtar, Mas'ood. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia. Hal. 80.



### **1.8 Sistematika Penulisan**

Agar karya ilmiah ini dapat dipahami lebih jelas maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan bab selanjutnya sebagai berikut:

Bab 2 ini nanti akan membahas mengenai Gambaran Umum Madagaskar mulai dari segi geografis, sejarah singkat, penduduk, etnis dan agama di Madagaskar, sistem politik pemerintahan di Madagaskar.

Bab 3. Krisis Politik di Madagaskar tahun 2009. Kemudian pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam karya ilmiah ini akan diulas pada Bab 4 .

Bab 4 membahas Bentuk Pelanggaran HAM dalam krisis tersebut.

Bab 5 akan menguraikan kesimpulan yang diperoleh dalam karya ilmiah ini.

## BAB 2.

### GAMBARAN UMUM MADAGASKAR

#### 2.1 Kondisi Geografis Madagaskar

Madagaskar merupakan sebuah pulau yang terletak berseberangan dengan pantai timur benua Afrika bagian selatan di Samudra Hindia. Sebagai pulau terbesar nomor empat di dunia, Madagaskar sedikit lebih besar dibandingkan Prancis tetapi sedikit lebih kecil dibandingkan Texas. Madagaskar terpisah dari benua Afrika selama lebih dari 150 juta tahun. Oleh karena itu, kebanyakan tumbuh-tumbuhan dan binatang yang hidup di sana tidak ditemukan ditempat lain.<sup>1</sup>Lokasinya yang terpencil, Madagaskar tidak ditempati manusia sampai sekitar 2.000 tahun yang lalu. Malagasy sebutan untuk penduduk di pulau tersebut merupakan keturunan dari nenek moyang orang Indonesia yang berhasil berlayar melalui Samudra Hindia. Orang-orang Arab dan Afrika kemudian datang dan memberi kontribusi penting bagi keistimewaan budaya di pulau tersebut. Beberapa ahli lainnya meyakini bahwa nenek moyang penduduk Madagaskar berasal dari orang-orang Indonesia dan Afrika yang telah bercampur sebelum sampai ke pulau terpencil tersebut. Bagaimana pun juga, mayoritas para ahli setuju bahwa penduduk Madagaskar tiba pada masa lebih modern (tidak ditemukan adanya bukti jaman batu di Madagaskar) dan migrasi yang berikutnya mendatangkan kelompok-kelompok lain (seperti Arab dan India) untuk ikut berbaur. Percampuran penduduk asli Malagasy (sebutan untuk penduduk Madagaskar) telah melahirkan kebudayaan yang menarik terdiri dari Asia Tenggara, India, Afrika, dan Timur Tengah Pada masa setelah kedatangan para bajak laut sepanjang pantai timur Afrika. Madagaskar dijajah oleh bangsa

---

<sup>1</sup> Anonim. tanpa tahun. *Gambaran tentang Madagaskar* [diakses pada tanggal 25 oktober 2013] dari <http://indonesia.mongabay.com/madagascar/01-introduction.html>

Perancis akhir abad ke 19. Madagaskar memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1960 dan sekarang merupakan sebuah negara demokrasi.<sup>2</sup>

Luas total Madagaskar adalah 587.040 km persegi. Titik tertinggi di negara pulau ini adalah Gunung Maromokotro di ketinggian 2.876 m. Lokasi geografis Madagaskar membuatnya menjadi negara kepulauan yang unik. Penduduk Madagaskar sekarang terdiri dari berbagai kelompok etnik yaitu Merina (27%), Betsimisaraka (15%), Betsileo (12%), Tsimihety (7%), Sakalava (6%), Antaisaka (5%) and Antandroy (5%). Bahasa yang dipakai di Madagaskar adalah bahasa Malagasy yang mirip dengan bahasa Maanyan (kalimantan) dan bahasa Perancis (karena merupakan koloni Perancis). Mata uang di Madagaskar adalah Ariary dimana 1 Euro adalah 2500 Ariary. 52% penduduk masih menganut animisme dan tradisi lama, 41% beragama Kristen, dan sekitar 7% beragama islam.<sup>3</sup> Madagaskar dapat dibagi menjadi lima wilayah geografis: pantai timur, Massif (kerak bumi) Tsaratanana, dataran tinggi tengah, pantai barat, dan pantai selatan. Dataran tinggi di tengah membentang sepanjang pulau dengan rentang ketinggian 2600 hingga 5800 kaki (800 hingga 1800 meter). Di wilayah Massif Tsaratanana pada ujung utara pulau terdapat gunung tertinggi pulau ini. Madagaskar sering disebut sebagai ‘*Great Red Island (Pulau Merah Besar)*’ oleh karena tanah merahnya, yang umumnya tidak bagus untuk pertanian. Madagaskar juga memiliki formasi batu kapur yang menarik di kawasan barat dan timur. Formasi ini dikenal dengan sebutan tsingy, terbentuk dari curahan air hujan selama bertahun-tahun, yang menyebabkan dasar batu kapur ini terkikis. Dari sudut pandang administrasi, pulau ini terbagi menjadi enam provinsi. Provinsi-provinsi ini dinamai modal mereka Antananarivo, Fianarantsoa, Toamasina, Mahajanga, Toliara, Antsiranana. Pada tahun 2004, pemerintah memangkas negara itu menjadi 22 daerah untuk mendesentralisasikan negara dan memungkinkan setiap daerah untuk mendapatkan beberapa otonomi. Madagaskar dengan ibukotanya Antananarivo dengan populasi 22.585.517 juta

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Anonim. tanpa tahun. *Republik Madagaskar*. Dari <http://baltyra.com/2011/12/29/republik-madagaskar> [diakses pada tanggal 26 oktober 2013]

jiwa. Sementara, ibukota itu adalah yang paling banyak penduduk. Kebanyakan orang pindah tempat di Ibukota untuk berbisnis, bekerja dan lain lain.

Oleh karena geografinya, iklim di Madagaskar berubah-ubah. Secara umum, Madagaskar memiliki dua musim: musim hujan yang panas mulai November hingga April, musim kemarau yang lebih dingin mulai Mei hingga Oktober. Pantai di bagian timur adalah wilayah paling basah di negara ini dan merupakan rumah bagi hutan hujan pulau ini. Area ini juga secara periodik diterpa badai tropis dan angin topan. Dataran tinggi tengah terasa lebih dingin dan lebih kering, dan banyak terdapat lokasi pertanian Madagaskar, terutama padi. Pantai bagian barat merupakan rumah bagi hutan gugur kering. Daun Pohon-pohon hutan gugur akan berguguran selama 6 hingga 8 bulan musim.<sup>4</sup>

## 2.2 Sejarah Madagaskar

Madagaskar memiliki sejarah yang cukup panjang mulai dari asal usul hingga sampai kemerdekaan. Sejarah Madagaskar dapat dibagi menjadi empat periode yaitu:

### 2.2.1 Asal usul

Ada beberapa yang mengidentifikasi bahwa nenek moyang orang Madagaskar adalah dari Asia, Afrika dan Timur Tengah. Populasi asal Melayu-Indonesia telah membawa budidaya padi. Migran Afrika juga membawa varietas pohon dan binatang (seperti sapi). Orang-orang Arab membawa agama Islam, serta aktivitas perdagangan rempah-rempah, dan tanaman obat. Adapun Eropa, yang pertama mendarat di Madagaskar adalah Portugis bernama Diego Diaz sekitar 1500. Akhirnya, asal usul Madagaskar adalah bisa dikatakan percampuran beberapa ras.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Anonim. tanpa tahun. *Jumlah Penduduk (Seluruhnya) di Masing-masing Negara* Dari [http://statistik.ptkpt.net/a.php?a=penduduk\\_usia&info1=3](http://statistik.ptkpt.net/a.php?a=penduduk_usia&info1=3) [diakses pada tanggal 26 oktober 2013]

<sup>5</sup> Anonim. tanpa tahun. *Histoire de Madagascar, (Sejarah Madagaskar)* dari <http://www.madadecouverte.com/madagascar-histoire.php> [diakses pada tanggal 26 oktober 2013]

### 2.2.2 Persatuan Madagaskar

Kerajaan Selatan, Timur, Barat dan Afrika Tengah, yang namanya Mahafaly, Sakalava Antemoro, Betsimisaraka, Betsileo, Merina, mereka masih menjadi referensi dan keturunan raja-raja kuno sangat dihormati. Dan itu didorong oleh Raja suku Merina Andrianampoinimerina abad kedelapan belas. Madagaskar menjadi negara bersatu, sebagian besar dibantu oleh penaklukan militernya didanai oleh Inggris yang ingin dan melindungi diri dari gangguan Perancis. Ia juga memulai pengembangan keaksaraan orang-orang Madagaskar serta perdagangan internasional. Setelah kematiannya pada tahun 1828, berbagai raja dan ratu berturut-turut, lebih atau kurang dekat dengan Eropa. Pada tahun 1868, Ratu Ranavalona II, sebagian besar kekuasaan yang didelegasikan kepada Perdana Menteri, yang tekun ditujukan untuk modernisasi negara. Sebuah kode sipil tertulis dan administrasi teritorial yang sangat terstruktur diterapkan.<sup>6</sup>

### 2.2.3 Penjajahan oleh Perancis

Dari paruh kedua abad kesembilan belas, Perancis dan Inggris menunjukkan lebih banyak minat kolonial Madagaskar, dan pada tahun 1883, munculah perang antara Perancis dan Madagascar. Pada tahun 1885 sebuah perjanjian damai ditandatangani yang melibatkan dominasi Perancis di Madagaskar. Pada tahun 1894, munculah perang kedua antara Perancis dan Madagaskar yang bernama perang Franco-Malagasi, dan berakhir dengan kegagalan tentara Madagaskar dan penandatanganan Perjanjian Protektorat pada tahun 1895. Setelah pemberontakan, Madagaskar menjadi resmi koloni Perancis pada tahun 1896. Semua pertanian, mineral Madagaskar tergantung pada pelayanan ekonomi dan kebutuhan Perancis.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

### 2.2.4 Kemerdekaan

Madagaskar resmi merdeka pada tanggal 26 juni 1960. Beberapa presiden yang sudah memimpin negara ini mulai 1960 hingga sekarang. Berikut adalah kronologi nama-nama Presiden yang telah memimpin Madagaskar.

**Tabel 2.2 Kronologi Nama-nama Presiden yang telah memimpin Madagaskar**

Madagaskar merdeka tahun 1960	
↓	
<b>Jabatan(tahun)</b>	<b>Nama Presiden</b>
1960 – 1972	Philbert Tsiranana
1972 – 1975	Jenderal Gabriel Ramanantsoa
1975	Kolonel Richard Ratsimandrava
1976 – 1991	Didier Ratsiraka
1991 – 1996	Albert Zafy
1996 – 2002	Didier Ratsiraka
2002 – 2009	Marc Ravalomanana
2009 – 2014	Andry Rajoelina
2014 – Sekarang	Hery Rajaonarimampianina

Sumber: <http://www.jeuneafrique.com> [diakses pada tanggal 26 oktober 2013]

Madagaskar resmi merdeka pada tanggal 26 juni 1960. Philibert Tsiranana adalah yang terpilih sebagai Presiden pada tahun 1960 dan terpilih kembali pada 30 Maret 1965. Kemudian Presiden ini masih terpilih Presiden di masa jabatan

ketiga pada 30 January 1972. Madagaskar kemudian menciptakan bank sentral sendiri, mata uang dan menarik diri dari zona Perancis dan pasukan terakhir asal Perancis meninggalkan negara itu secara permanen Namun hasil ekonomi masih sangat mengecewakan, protes dan gerakan masih berlanjut sampai suksesnya kekuasaan Didier Ratsiraka pada bulan Juli 1976.<sup>8</sup> Para mahasiswa tidak setuju lagi dengan pemerintah Philbert Tsiranana yang sudah menjabat tiga putaran ini dan akhirnya munculah demonstrasi-demonstrasi. Dimana situasi di negara ini juga masih belum stabil dan adanya protes para rakyat, gerakan, pemogokan, demonstrasi, kerusuhan karena kehadiran Perancis semakin kuat dan akhirnya adanya referendum pada 8 Oktober 1972 yang mana referendum ini menandai lahirnya Republik Kedua. Presiden Philibert Tsiranana mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan ke Jenderal Gabriel Ramanantsoa. Seorang militer yang bernama Didier Ratsiraka adalah Menteri Luar Negeri selama Transisi militer Malagasi (1972-1975) di bawah Presiden transisi Jenderal Ramanantsoa Kemudian pada tanggal 5 Februari 1975, Jenderal Ramanantsoa mengundurkan diri dan Kolonel Richard Ratsimandrava menggantikan dia . Pada tanggal 11 Februari 1975, Kolonel Richard Ratsimandrava telah ditembak yang mana sampai sekarang belum diketahui siapa pelaku penembaknya . Pada akhirnya, tanggal 15 Juni 1975 Letnan Komandan Didier Ratsiraka diangkat menjadi kepala negara. Pemimpin baru ini menetapkan gaya republik sosialis, otoriter, sangat sentralistik, sebagian besar wilayah perekonomian dinasionalisasi. Didier Ratsiraka adalah seorang militer yang dua kali terpilih menjadi Presiden Republik ( 1975-1993 dan 1997-2002). Mantan Presiden ini mengadakan Buku merah yang menganjurkan kebijakan luar negeri baru berdasarkan prinsip kebijakan *non-alignment*<sup>9</sup>, desentralisasi pemerintahan, stimulasi ekonomi melalui perencanaan ketat dan kontribusi rakyat. Populasi bosan dengan perdebatan politik yang tidak berakhir, jalan bergelombang, kenaikan harga, kurangnya perlindungan sosial dan korupsi. Pada tanggal 10 Agustus 1991 para polisi menadakan demonstrasi anti-pemerintah dan munculah pemerintahan transisi yang diketuai oleh Albert Zafy

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Negara yang tidak selaras dengan negara lain dalam Pakta atau perjanjian.

pada tanggal 31 Oktober 1991 dan transisi tersebut adalah menandai lahirnya Republik Ketiga. Pada 10 Februari 1993 Albert Zafy terpilih jadi Presiden dan menjabat hingga sampai 29 Desember 1996. Setelah itu, Didier Ratsiraka terpilih kembali sebagai Presiden hingga pada tahun 2002. Saat itulah Didier Ratsiraka menciptakan ekologi humanis Republik, proyek utopis didasarkan pada keyakinan bahwa manusia dapat menciptakan masyarakat selaras dengan keseimbangan ekologi dan ekonomi harus dilengkapi dengan program-program pengembangan sosial, memerangi kemiskinan merupakan prioritas utama. Pada tahun 2001, indikator ekonomi yang terlihat baik, kepercayaan donor, pengembangan pariwisata meningkat. Tapi indikator ekonomi sangat berbeda dari realitas dan kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2002, Marc Ravalomanana adalah terpilih sebagai Presiden. Krisis politik masih berlanjut dan kondisi ekonomi semakin parah.<sup>10</sup>

## **2.3 Sistem Politik dan Pemerintahan Madagaskar**

### **2.3.1 Badan eksekutif, legislatif dan yudikatif**

Republik Madagaskar muncul dengan adanya pembentukan Konstitusi pada tahun 1992. Madagaskar adalah Republik yang demokratis seperti apa yang telah ditulis dalam konstitusi pasal 1 ayat 2 dan 3 berbunyi:

*(2) This State shall be a Republic, unique and indivisible, and shall be named "Republic of Madagascar."*

*(3) Democracy shall be the basis of the Republic. Its sovereignty shall be exercised within the territorial limits recognized by international law.<sup>11</sup>*

Konstitusi tersebut mengatur pemerintahan dan politik Madagaskar, dan terdiri dari 149 artikel yang disediakan untuk pemisahan kekuasaan antara cabang-cabang eksekutif, legislatif, yudikatif pemerintah, pembentukan sistem politik

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Madascar Constitution 1992 dari <http://www.servat.unibe.ch/icl/ma00000.html> [diakses pada tanggal 26 oktober 2013]



multi partai, dan perlindungan hak asasi manusia individu dan kebebasan. Setelah kemerdekaan Madagaskar pada tahun 1960, republik pertama adalah tahun 1960-1972 tetap sangat berhubungan dengan Perancis, kemudian republik kedua dipimpin oleh Presiden Didier Ratsiraka selama perang dingin yang memiliki hubungan kuat dengan blok negara-negara sosialis sehingga dia dihormati oleh rakyat. Konstitusi Republik ketiga disusun pada tahun 1992. Republik keempat diadopsi oleh referendum pada 17 November 2010. Masing-masing dari empat Republik berturut-turut membawa perubahan besar landasan politik, tetapi mereka semua telah mempertahankan dominasi Presiden dalam struktur konstitusional. Madagaskar juga memiliki sistem multi partai.<sup>12</sup>

Pemisahan kekuasaan utama antara tiga cabang pemerintahan Madagaskar yaitu eksekutif, legislatif dan peradilan didirikan untuk kelancaran sistem politik Madagaskar. Sistem tersebut adalah trias politika. Trias Politika adalah teori tentang sistem politik yang membagi kekuasaan pemerintahan negara dalam tiga komponen: pemerintah, parlemen dan kekuasaan peradilan.

Tiga lembaga tersebut dapat dibagi antara lain:

- Presiden Republik dan Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif
- Majelis Nasional dan Senat sebagai pemegang kekuasaan legislatif
- Mahkamah Konstitusi Tinggi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif.

Cabang eksekutif pemerintahan Madagaskar terdiri dari Presiden, Perdana Menteri dan para menternya yang berfungsi di bawah mereka. Kekuasaan eksekutif, termasuk Presiden secara tradisional telah mendominasi. Setiap Presiden dalam sejarah negara pasca kolonial, mengubah Konstitusi untuk kebutuhannya dan akhirnya memperkuat kekuasaan Presiden. Presiden menunjuk Perdana Menteri sejak 1995 (antara 1992-1995 ia ditunjuk oleh Majelis Nasional). Ada sedikit perbedaan antara jaringan politik Presiden dan peran kepresidenan; peran dominan dapat dipahami sebagai sebuah warisan budaya kerajaan lama. Jika calon Perdana Menteri tidak mencapai mayoritas mutlak suara dalam parlemen, Presiden dapat memilih calon dari Gedung Parlemen yang akan mengantarkan

---

<sup>12</sup> Anonim. tanpa tahun. *Madagascar Government and Politics* dari <http://www.mapsofworld.com> {diakses pada tanggal 26 oktober 2013}

selama satu tahun. Dalam konstitusi, Presiden berfungsi sebagai lambang persatuan nasional. Presiden juga adalah pemimpin yang mengakui kebijakan luar negeri dan merupakan seorang politikus yang paling kuat dalam negeri dan juga pemimpin tertinggi militer. Perdana Menteri bertanggung jawab untuk fungsi pemerintahan. Presiden dipilih untuk jangka waktu lima tahun dan terbatas pada satu periode jabatan. Presiden republik mempunyai hak untuk membubarkan Majelis Nasional atas usul Dewan Menteri. Salah satu tanggung jawab Perdana menteri juga adalah mengkoordinasi kegiatan departemen pemerintahan (menteri), melindungi keselamatan publik (kepala administrasi) dan penegakan hukum. Dalam hal ada dua calon Presiden yang menang, pemilihan lanjutan diadakan antara dua kandidat terkemuka dalam waktu dua bulan.<sup>13</sup>

Di bagian legislatif, Madagaskar memiliki sistem bikameral yang mana Parlemen yang merupakan bagian utama dari cabang legislatif negara terdiri dari dua kamar yaitu Majelis Nasional dan Senat. Anggota Majelis memiliki nama *deputies of Madagascar* (terbukti dalam pasal 66 dalam konstitusi). Mereka akan dipilih oleh hak pilih universal yang langsung untuk jabatan empat tahun. Senat memiliki nama *senator of Madagascar* dan masa jabatan mereka empat tahun juga. Dua-pertiga dari Senat terdiri dari jumlah anggota yang dipilih di tiap daerah pemilihan wakil-wakil terpilih entitas teritorial yang sama, dan satu-ketiga terdiri dari anggota yang mewakili kelompok ekonomi, sosial, budaya, dan agama yang ditunjuk oleh Presiden Republik berdasarkan nominasi oleh hukum pelan organisasi dan kelompok. Majelis Nasional bertugas untuk menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Fungsi pengawasan parlemen itu berkaitan dengan pengawasan mengenai sejauh mana kebijakan yang tertuang secara mengikat dalam bentuk undang-undang itu dijabarkan sebagaimana mestinya dalam berbagai peraturan pelaksanaannya. Pengawasan mengenai sejauhmana kebijakan-kebijakan itu tercermin dalam bentuk program yang didukung anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

pengawasan mengenai implementasi berbagai peraturan perundang-undangan itu dalam praktik di lapangan, dan pengawasan terhadap kualitas pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam APBN dan APBD dalam kenyataan.

Di badan yuridikatif, lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah tinggi. Kemudian ada badan-badan peradilan lainnya termasuk administrasi dan keuangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, pengadilan banding, pengadilan dan pengadilan tinggi Kehakiman. Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk hukum, peraturan, dan regulasi, serta yurisdiksi konflik antara dua atau lebih lembaga negara dan di antara lembaga negara dan teritorial entitas desentralisasi. Penciptaan sistem kompleks ini menunjukkan keinginan para perumus konstitusional untuk sebuah masyarakat yang dibangun di atas aturan hukum. Konstitusi secara eksplisit menguraikan hak-hak dasar warga negara individu dan kelompok-kelompok (terutama kebebasan berbicara) dan menjamin keberadaan independen yang bebas dari kontrol pemerintah atau sensor. Mahkamah Konstitusi Tinggi memiliki yurisdiksi penuh. Mahkamah Agung adalah lembaga Negara yang bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran fungsi yuridiksi, memantau kepatuhan terhadap aturan etika yang khusus untuk para hakim serta tindakan personil lembaga pengadilan dan menilai keputusan kasasi yang dibuat oleh pengadilan peradilan.<sup>14</sup>

### **2.3.2 Sejarah Singkat militer di Madagaskar**

Setelah mantan Presiden Ratsiraka yang berkuasa pada tahun 1975, dia berjanji untuk membawa perubahan ke arah sosialis atau yang disebut “revolusi sosialis”<sup>15</sup>. Sebagai bagian dari kebijakan ini, Ratsiraka memperbesar dan menata ulang pasukan keamanan untuk membuat mereka cocok dengan tentara rakyat dalam keadaan “*sosialis revolusioner*”. Pada tahun 1975 ia dinamai FAP (*Forces Armées Populaires*). Selanjutnya, FAP terlibat dalam program aksi kewarganegaraan dan menyebarkan ideologis pendidikan di daerah pedesaan. Antara tahun 1975 dan 1980, FAP berkembang pesat. Reorganisasi ini melibatkan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Revolusi sosialis adalah merupakan suatu doktrin yang dikenal sebagai paham dari Komunis

kekuatan mantan tentara nasional, yang setia kepada Ratsiraka. Untuk mencegah FAP menantang kekuasaannya, Ratsiraka mulai mampu dan berpengalaman sebagai pejabat dari pasukan komando yang bertanggung jawab untuk posisi yang lebih senior. Bagian Inspektur Jenderal kantor Presiden dan di berbagai Komite Kementerian Pertahanan yang mempelajari bagaimana FAP bisa terbaik memfasilitasi pembangunan nasional. Meskipun demikian, FAP berkontribusi sedikit untuk negara “revolusi sosialis” dan tetap sebagai politikus yang berpotensi penting. Namun demikian, Ratsiraka mengandalkan manipulasi dan intimidasi untuk mempertahankan kontrol mutlak Angkatan bersenjata sampai pertumbuhan gerakan pro-demokrasi<sup>16</sup> di awal 1990-an. Pro demokrasi dan anti faksi<sup>17</sup> muncul di FAP dan banyak bantuan (*support*) layanan keamanan negara lainnya.<sup>18</sup> Bentrokan antara faksi ini menambah kekacauan politik yang menimpa Madagaskar, yang akhirnya rezim Ratsiraka runtuh. Di bawah rezim Ratsiraka, FAP dalam hubungannya dengan Departemen Pertahanan setiap tahunnya dinilai sebagai kebutuhan militer. Departemen Pertahanan memperoleh prioritas anggaran belanja militer pada masa pemerintahan Ratsiraka. Dengan pembentukan FAP pada tahun 1975, biaya pemeliharaan pembentukan militer menjadi beban yang lebih besar pada anggaran nasional. Namun setelah perang dingin berakhir dan menolak bantuan militer Asing, anggaran pertahanan Malagasi juga menurun lebih dari US\$ 101 juta pada tahun 1979 dan sekitar US\$ 36 juta pada tahun 1991.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

<sup>17</sup> Faksi (*Faction*) adalah kelompok politik atau bersenjata yang diberikannya perjuangan untuk pengaruh yang lebih luas.

<sup>18</sup> Anonim. tanpa tahun. *Library of Congress Country Studies, Military Madagascar* [http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Military\\_of\\_Madagascar.html](http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Military_of_Madagascar.html) [26 oktober 2013]

<sup>19</sup> Thomas P. Ofcansky, 1994. *Madagascar-The Military and the Government People's Armed Forces troops of Madagascar* at <http://www.mongabay.com> [diakses pada tanggal 15 Desember 2013]

## BAB 3

### FAKTOR MUNCULNYA KRISIS POLITIK TAHUN 2009

Madagaskar telah mengalami ketidakstabilan politik sejak awal 2009 oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis lebih rinci kondisi politik di Madagaskar pada tahun 2009.

#### 3.1 Kondisi politik di Madagaskar pada tahun 2009

Krisis politik yang terjadi di Madagaskar 2009 disebabkan oleh ketegangan antara Presiden terpilih Marc Ravalomanana<sup>1</sup> dan gerakan oposisi yang dipimpin oleh Andry Rajoelina<sup>2</sup> (Walikota ibukota, Antananarivo). Protes massa terjadi pada awal 2009 dan akhirnya militer mendukung pihak oposisi untuk menjatuhkan Presiden Ravalomanana dari kekuasaannya. Rajoelina kemudian membentuk pemerintah transisi dan menyatakan diri sebagai kepala transisi dan Presiden Ravalomanana melarikan diri ke Afrika Selatan.

Protes-protes yang terjadi selama ketegangan antara dua pihak ini menyebabkan kekerasan dan bentrokan dengan pasukan keamanan nasional. Negosiasi antara para pihak mengarah ke penandatanganan perjanjian tahun 2009 di Maputo Mozambika untuk membentuk pemerintah transisi yang inklusif tetapi Rajoelina membutuhkan pemerintahan "Unilateral"<sup>3</sup> dan juga para pendukungnya. Rapat yang telah dilaksanakan untuk menolak usulan pemerintah tersebut akhirnya diadakan negosiasi kembali. Dua perundingan perjanjian kemudian juga gagal untuk menghasilkan sebuah pemerintah kesatuan dalam proses transisi.

Tidak adanya titik terang dalam politik mempengaruhi kelemahan pertumbuhan ekonomi dan hubungan dengan donor internasional yang negatif.

---

<sup>1</sup> Marc Ravalomanana adalah Presiden telah dipilih secara demokratis dan telah menjabat sejak 6 Mei 2002 sampai Maret 2009.

<sup>2</sup> Andry Rajoelina adalah Presiden transisi yang menjabat paska kudeta yang terjadi di Madagaskar sampai tahun 2013.

<sup>3</sup> Unilateralisme, adalah doktrin atau agenda yang menyokong tindakan berat sebelah. Tindakan seumpama ini boleh jadi tidak dipedulikan untuk pihak lain, atau sebagai satu pernyataan tentang komitmen terhadap suatu arahan pihak lain yang untuk memungkinkan suatu persetujuan.

Pemerintah negara lain termasuk Amerika Serikat(AS) bereaksi terhadap perebutan kekuasaan Andry Rajoelina dan mengurangi kerja sama yang mana pada rezim Marc Ravalomanana negara tersebut sangat aktif bekerja sama dengan Madagaskar. Hal itu tercermin pada penghentian keanggotaan dalam beberapa lembaga multilateral, pembatasan bantuan dan penghapusan perdagangan. Pembatasan bantuan secara signifikan menurunkan APBN Madagaskar. Bantuan AS dibatasi dalam hal kemanusiaan, dalam program-program pembangunan yang disampaikan melalui saluran non-pemerintah.<sup>4</sup> Menurunnya hal tersebut mengakibatkan ancaman terhadap "civil security" serta ekonomi rakyat karena pendapatan negara berkurang. Madagaskar juga menghadapi sejumlah tekanan di lingkungan Afrika. unik Madagaskar. Tujuan masyarakat internasional dalam membangun pemerintah yang multilateral adalah untuk memperkuat kohesi sosial dengan membangun dukungan dalam kebebasan berekspresi, perbedaan politik, saling menghormati dan toleransi sosial, rekonsiliasi sosial dan politik, dan hak asasi manusia. Beberapa analis memperkirakan bahwa tekanan sosial dari masyarakat internasional ini akhirnya memaksa partai politik untuk melakukan negosiasi untuk mendapatkan solusi dalam kebuntuan politik saat itu. Hal ini untuk mengatasi masalah yang timbul dari krisis politik yang sedang berjalan yang merongrong tujuan tersebut.

Selama perebutan kekuasaan yang terjadi antara dua pihak yang bertentangan, hal yang paling menonjol terjadi di tahun 2009 adalah pelanggaran HAM yang berawal pada desember 2008. Selama krisis politik di tahun 2009, pelanggaran HAM terjadi seperti tewasnya rakyat sipil, penangkapan yang tidak sah dan terlukanya rakyat yang mencari kemakmuran.

Oleh karena itu pada tahun 2010, lebih tepatnya tanggal 11 maret 2010, *Human security report* melaporkan bahwa telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang serius di Madagaskar pada tahun 2009.

---

<sup>4</sup> Millenium Challenge Account mempunyai senilai sekitar \$110 juta dan telah dihentikan oleh pemerintah AS pada Mei 2009.

**Tabel 3.1 Daftar Partai Politik terlibat dalam krisis politik di Madagaskar tahun 2009**

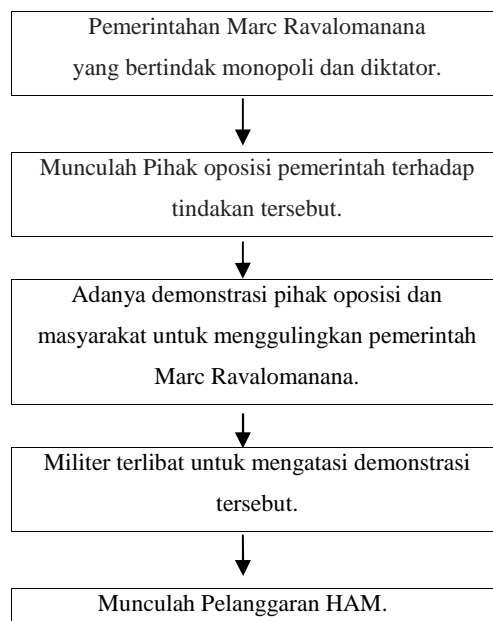
No	Tahun	Rezim Politik	Partai Politik	Pemimpin
1	2002	Marc Ravalomanana	TIM ( Tiako I Madagasikara)	Sipil  (Marc Ravalomanana)
2	2009	Andry Rajoelina	TGV  (Tanora Gasy Vonona)	Sipil  (Andry Rajoelina)

Sumber : La crise politique malgache dari <http://www.courrierinternational.com/dossier/2009/02/09/la-crise-politique-malgach> [diakses pada tanggal 7 January 2014]

### 3.2 Kebijakan pemerintah Marc Ravalomanana sebagai faktor munculnya krisis.

Untuk meneliti faktor munculnya krisis di Madagaskar 2009, peneliti menggunakan alur pemikiran sebagai berikut.

**Gambar 3.1 Alur Pemikiran**



Marc Ravalomanana adalah mulai menjabat sejak tahun 2002 pada 6 Mei 2002 sampai dengan 17 Maret 2009. Dia menjabat dua kali dimana pada tahun 2006, dia terpilih kembali dengan 55% suara. Pada pemilihan presiden tahun 2001 mulai terjadi krisis politik di Madagaskar di mana krisis tersebut semakin membesar sampai tahun 2009. Faktor penyebab munculnya krisis tersebut terkait dengan kebijakan pemimpin pada waktu itu. Meskipun demikian, hal tersebut bukan berarti rakyat Madagaskar setuju dengan pemimpin. Berikut ini penulis memaparkan kebijakan- kebijakan selama pemerintahan Marc Ravalomanana.<sup>5</sup>

### 3.2.1 Kebijakan di bidang Politik

Pemerintahan Marc Ravalomanan telah melakukan amandemen terhadap konstitusi sebelumnya. Kata konstitusi secara literal berasal dari bahasa Perancis ‘*Constituir*’, yang berarti membentuk. Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan dengan pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan sebuah Negara. Konstitusi juga dapat berarti peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan suatu Negara.<sup>6</sup>

Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu Negara merupakan sesuatu hal yang sangat krusial karena tanpa konstitusi Negara tidak akan terbentuk. Pada abad ke-21 ini, hampir tidak ada Negara yang tidak memiliki konstitusi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya konstitusi sebagai suatu perangkat Negara. Konstitusi dan Negara ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak terpisahkan.<sup>7</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan modern, terdapat dua model perubahan konstitusi, yaitu *renewal* (pembaruan) dan amandemen (perubahan). *Renewal* adalah sistem perubahan konstitusi melalui perubahan secara menyeluruh, Sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Negara yang menganut system *renewal* ini antara lain Belanda, Jerman dan

---

<sup>5</sup>Lauren Ploch and Nicolas Cook.2012 “*Madagascar’s Political Crisis*” Congressional Research Service

<sup>6</sup> Tim ICCE. *Opt.Cit.* hal 89

<sup>7</sup> *Ibid.* hal 92



Perancis. Sedangkan, amandemen adalah perubahan konstitusi yang apabila suatu konstitusi diubah, konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain, perubahan pada model amandemen tidak terjadi secara keseluruhan bagian dalam konstitusi asli sehingga hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran menyertai konstitusi awal. Negara yang menganut system ini adalah Amerika Serikat termasuk Madagaskar.<sup>8</sup>

Konstitusi Madagaskar terus mengalami perubahan. Pada awalnya konstitusi yang digunakan adalah konstitusi tahun 1992.<sup>9</sup> Dalam konstitusi tahun 1992 ini terdapat 149 pasal dimana pada jabatannya Marc Ravalomanana konstitusi tersebut mengalami perubahan yaitu dengan adanya konstitusi tahun 2007 yang dideklarasikan tanggal 27 April 2007 menyatakan bahwa Presiden Republik dipilih dengan pemilihan umum langsung untuk jangka waktu lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan (Pasal 45).<sup>10</sup> Ketentuan tersebut berbeda dengan konstitusi sebelumnya yaitu dalam konstitusi tahun 1992 menyatakan bahwa Presiden Republik dipilih dengan pemilihan umum langsung untuk jangka waktu lima tahun . dan hanya satu kali masa jabatan. (Pasal 45). Dengan adanya perubahan konstitusi tersebut, Presiden Ravalomanana memiliki kesempatan untuk terpilih menjadi presiden kedua kalinya .Dalam waktu 5 tahun, Presiden bisa melakukan perubahan yang diinginkan agar tetap berkuasa. Apabila perubahan-perubahan tersebut tidak selesai dengan satu jabatan, maka dia bisa menjadi calon presiden lagi dan melanjutkan programnya karena didalam konstitusi membolehkan untuk mencalonkan diri dua kali. Oleh karena itu, maka monopoli kekuasaan tidak terhindarkan. Meskipun di Madagascar terdapat badan legislatif, Yudikatif dan Eksekutif namun kekuasaan tetap di tangan presiden sehingga Legislatif dan Yudikatif harus mematuhi perintah presiden.<sup>11</sup> Selain itu, dia merubah salah satu pasal yang terkait dengan pembubarkan Majelis Nasional di mana pada konstitusi sebelumnya dalam pasal 95 menyatakan bahwa

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hl 69-70

<sup>9</sup> *Madagascar constitution*, Constitution du 19 aout 1992 dari <http://mjp.univ-perp.fr/constit/mg1992.htm> [diakses pada tanggal 7 January 2014]

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

pembubaran Majelis Nasional dapat diputuskan oleh Dewan Menteri, sementara pasal ini diganti dengan pasal 98 yang menyatakan bahwa Presiden Republik dapat membubarkan Majelis Nasional, Pembubaran akan dinyatakan sesuai dengan keputusan Keputusan Presiden Republik. Pembuatan konstitusi ini bertujuan untuk memperoleh mayoritas kursi di Majelis Nasional.<sup>12</sup>

Pun demikian, konstitusi baru ini menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi ketiga.<sup>13</sup> Hal ini tertulis dalam Pasal 4 dimana pada konstitusi sebelumnya menyatakan bahwa bahasa Nasional adalah bahasa Malagasy. Dalam konstitusi lama ini pun tidak menyatakan bahwa bahasa resmi adalah bahasa Perancis tapi karena Madagaskar adalah jajahan Perancis jadi Perancis menjadi bahasa resminya. Masalah ini juga sering menimbulkan kontroversi, mengingat bahasa Inggris benar-benar tidak diketahui oleh sebagian besar penduduk Malagasi. Menurut perhitungan politik, hal ini bertujuan untuk lebih dekat dengan Afrika Selatan atau mitra dagang Inggris. Pengamat menunjukkan bahwa jumlah guru Perancis tidak cukup dan bahwa bahasa pertama negara yaitu bahasa Malagasy memiliki variasi sangat jelas yang kadang membuat tidak mungkin untuk komunikasi antara orang yang tinggal di daerah terpencil ini.

Salah satu tujuan dari perubahan konstitusi ini juga karena Madagaskar merupakan bagian dari SADC (*Southern African Development Community*)<sup>14</sup> di mana dalam komunitas ini melakukan perdagangan menggunakan bahasa Inggris. Perubahan linguistik (malagasy ke Inggris) akan memungkinkan pengembangan perdagangan terutama dengan Afrika Selatan, yang merupakan ‘mesin besar’ di benua Afrika. Selain itu, karena Amerika Serikat adalah Negara yang mendukung pemerintahan Marc Ravalomanana di mana bahasa yang dipakai oleh Negara tersebut adalah bahasa Inggris. Bantuan- bantuan dari Negara yang berbahasa Inggris (AS dan Inggris) juga akan lancar jika Madagaskar menggunakan bahasa

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Anonim. Tanpa tahun. *RFI Ravalomanana renforce ses pouvoirs et adopte l'anglais* (Ravalomanana memperkuat kekuasaannya dan mengadopsi bahasa Inggris) dari [http://www.rfi.fr/actufr/articles/088/article\\_50842.asp](http://www.rfi.fr/actufr/articles/088/article_50842.asp) [diakses pada tanggal 7 January 2014]

<sup>14</sup> *The Southern African Development Community (SADC) is an inter-governmental organization headquartered in Gaborone, Botswana. Its goal is to further socio-economic cooperation and integration as well as political and security cooperation among 15 southern African states. It complements the role of the African Union.*

inggris sebagai bahasa resmi. Perubahan bahasa juga berimplikasi pada lancarnya pedagang oleh karenanya dijadikan bahasa resmi ketiga. Perubahan bahasa juga membuat munculnya perusahaan-perusahaan asing yang mengeksploitasi sumber daya Madagaskar secara besar-besaran.<sup>15</sup> Oleh karena itu, sumber daya Madagaskar dikuasai oleh perusahaan asing dan pemimpin juga mengutamakan keuntungan pribadi, maka munculah krisis politik.

Pasal 46 dalam konstitusi lama juga mengalami perubahan di mana konstitusi baru ini menegaskan bahwa setiap calon presiden harus kewarganegaraan Malagasy dan setidaknya empat puluh tahun serta berada di wilayah Republik Madagaskar selama enam bulan sebelum tanggal pengajuan aplikasi untuk menjadi calon presiden. Hal ini terkait dengan adanya dua politisi yang bernama Pierrot Rajaonarivelo (Pro mantan Presiden Ratsiraka yaitu presiden sebelum Ravalomanana), di mana politisi ini adalah oposisi Marc Ravalomanana yang sangat memiliki potensi cukup besar dan sedang tinggal di luar negeri.<sup>16</sup>

Hal yang menarik juga pada pemerintahan ini adalah adanya pembatasan ruang gerak. Selama kepemimpinannya mulai tahun 2002, Ravalomanana telah mendapat kekuasaan yang lebih besar ketika hasil referendum tahun 2007 menunjukkan bahwa 70 persen pemilih menyetujui amandemen konstitusi yang memungkinkan meluasnya kekuasaan presiden. Pada saat itu, Ravalomanana dengan dukungan rakyat yang cukup besar, telah diperebutkan hasil pemilu dan mengklaim kemenangan setelah putaran pertama sebelum menyatakan diri Presiden Republik Malagasi pada 22 Februari 2002. Selama pemilu yang diselenggarakan di bawah mandat Marc Ravalomanana, TIM selalu menang. Berikut ini adalah table yang menunjukkan bahwa partai TIM mendominasi beberapa kursi di parlemen.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Friedrich Ebert Stiftung. Les partis politiques malgaches à travers les régimes et gouvernements successifs (Partai politik Malagasi melalui pemerintah dan rezim yang berganti ).Dari <http://www.fes-madagascar.org/media/publications/Etude%20partis%20politiques.pdf> [diakses pada tanggal 7 January 2014]

**Tabel 3.2 Partai di Parlemen Madagaskar Tahun 2002 dan pada tahun 2007**

No	Tahun	Partai Politik	Jumlah kursi	Jumlah kursi yang dikuasai
1	2002	-TIM -AREMA -TTS/MTS -AVI -RPSD LEADER FANILO MFM AVI+TIM+RPSD	160	108 3 3 9 7 1 17 7
2	2007	-TIM -LEADER FANILO -AME -LIARAIKE	127	105 1 1 1

Sumber: Source : HCC ( High Constitutional Courts) of Madagascar

Jika kita lihat tabel diatas, maka terlihat bahwa partai Tim yang dipimpin oleh Marc Ravalomanana adalah sangat dominan selama dia menjabat. Hal ini akan melancarkan program yang akan disampaikan oleh Presiden karena kebanyakan orang yang duduk di parlemen adalah pendukungnya. Partai presiden Marc Ravalomanana diperkirakan mempertahankan mayoritas kursi. Keuntungan dari hal tersebut adalah apabila ada yang protes tentang tindakan pemerintah , mereka tidak dapat karena proses *impeachment* di Madagaskar hanya dapat dilakukan oleh Badan Senat dan Majelis Nasional, di mana partai Ravalomanana mendominasi di dalamnya.<sup>18</sup>

<sup>18</sup>Anonim. tanpa tahun. *Madagascar : scores dead in political violence*” di situs [www.allafrica.com](http://www.allafrica.com) [diakses pada tanggal 20 January 2014]

### 3.2.2 Kebijakan di Bidang Ekonomi

Para pemerintah menggunakan uang rakyat namun di samping itu 65% masyarakat Madagaskar sudah menderita kemiskinan. Hal ini terjadi karena pemerintah lebih fokus kepada keuntungan pribadi. Hal tersebut mendorong adanya krisis pangan karena uang yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat digunakan untuk kebutuhan pribadi. Orang miskin dipinggir jalan semakin banyak. Rakyat pasti akan mempertanyakan mengapa uang Negara tersebut tidak digunakan untuk mengatasi masalah pangan dan atau untuk kebijakan social lainnya.<sup>19</sup>

Salah satu faktor yang menimbulkan kemarahan masyarakat juga terhadap tindakan Marc Ravalomanana menggunakan uang Negara untuk kebutuhan sendiri. Buktinya dalah dengan membeli pesawat khusus kepresidenan senilai 60 juta dolar AS, yang digunakan untuk melakukan lawatan ke luar negeri.<sup>20</sup>

Berikut ini adalah harga pesawat tersebut:

**Tabel 3.3 JET PRICES**

Airplane Famillies	2008 \$ in Millions
737-600	51,5 – 58,5
737-700	58,5 - 69,5
737-800	72,5 – 81,0

Sumber: Air force one stories dari <http://www.madagate.com/politique-madagascar/dossier/2785-madagascarn-air-force-one-stories.html> [diakses pada tanggal 20 January 2014]

Dimana, pesawat yang dibeli oleh President adalah pesawat yang bernama Airplane Famillies 737-700 yang masih baru dan harganya antara 58.5 sampai 69.5 juta dolar. Di mana disini Presiden Ravalomanana mencampuradukkan kepentingan umum dengan pribadi. Hal ini memberikan kontribusi terhadap

<sup>19</sup> Anonim. tanpa tahun. *Current Political Crisis Information*[diakses pada tanggal 20 January 2014]

<sup>20</sup> Anonim. tanpa tahun. *Madagascar: Air Force One stories* Berita Madagate.com dari <http://www.madagate.com/politique-madagascar/dossier/2785-madagascarn-air-force-one-stories.html> [diakses pada tanggal 20 January 2014]

memburuknya situasi politik yang sudah tegang di Madagaskar. Menurut rakyat Madagaskar, uang yang digunakan untuk membeli pesawat seharusnya bisa digunakan untuk proyek-proyek pembangunan di Negara.<sup>21</sup>

Ravalomanan juga memonopoli nenerapa perusahaan komersial. Dia menguasai dan bahkan memonopoli beberapa sumber perekonomian di Madagaskar. Hal tersebut terlihat dari besarnya laju perkembangan perusahaan-perusahaan miliknya seperti perusahaan yang bernama TIKO dan MAGRO. TIKO adalah salah satu perusahaan milik Ravalomanana yang hadir di bebrapa bidang dan semua produk disitu adalah yang mengandung susu,juah buah dan air mineral). Perusahaan Tiko didirikan pada pertengahan 1980 dengan dukungan dana dari Bank Dunia melalui International Finance Corporation, atau IFC Berikut ini adalah perusahaan TIKO yang ada di Madagaskar diantaranya TIKO OIL yang berhubungan dengan minyak dan kedelai, TIKO AGRI mengumpulkan segala sesuatu dilakukan dalam hal bahan baku, FEED MILL (bergerak di bidang yang berhubungan dengan pakan dari jagung dan singkong ), TIKO FARM adalah yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berhubungan sapi dan babi. Pada tahun 2005, perusahaan ini sangat menguntungkan karena adanya pembebasan pajak di mana Tiko Oil Company telah menjadi penerima manfaat eksponensial di mana perusahaan Tiko Oil ini menimpor minyak dan tidak kena pajak karena bebas dari biaya apapun. Selain itu, pemerintah juga impor sapi Belanda yang terkenal “*Holstein*”<sup>22</sup>. Sapi tersebut dijual kembali di Madagaskar dengan harga 1.500 euro per sapi. Jadi dibelikan dengan harga murah dan dijual dengan harga mahal dengan petani Madagaskar dan akhirnya petani tersebut tidak mampu beli dan perusahaan TIKO yang jadi pemiliknya. Contoh semacam ini, menunjukkan bagaimana bisnis Marc Ravalomanana sendiri berjalan dari urusan nasional yang

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Salah satu jenis sapi besar biasanya hitam-putih yang menghasilkan sejumlah susu besar relatif rendah lemak.

sebenarnya.<sup>23</sup> Beberapa diantaranya adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan pangan, waralaba (supermarket besar bernama MAGRO), pertanian dan pertambangan.

Selain itu, keluarga Marc Ravalomanana membeli supermarket Prisunic (departemen store di Madagaskar) dari Monegasque Cyril Department Store atau Madagaskar GMM (Grand Magasin de Madagaskar). Juga dia Kerja sama dengan Afrika selatan dan mendirikan supermarket yang bernama Supermarket Shoprite di mana shoprite tersebut hadir di 17 negara di Afrika. Oleh karena itu, ada Shoprite mana-mana terutama di Ibukota negara .

Beberapa hotel juga dibeli oleh Presiden Ravalomanana yaitu *Hilton Hotel* yang dijual oleh Perusahaan dan Henri Fraise Fils dimana nama hotel tersebut digantikan dengan nama *Carlton Hotel* pada tanggal 2 November 2007 setelah Marc Ravalomanana membelinya dan selain itu Presiden Ravalomanana juga memiliki saham hingga 40 % di Hotel Colbert. Dua puluh miliar Ariary<sup>24</sup> dalam catatan bank yang digunakan untuk memulihkan serta memperkaya pundi-pundi Tiko dan partai TIM yang berkuasa.<sup>25</sup>

Hal yang menarik adalah di mana Presiden Ravalomanana menyewakan tanah sebesar 1,3 juta hektar lahan pertanian di Madagaskar di industri Korea Selatan “Daewoo” untuk menanam jagung untuk diekspor kembali ke Korea. Tanah tersebut yang seharusnya milik rakyat Madagaskar dan bisa dilola oleh petani Madagaskar. Hal ini telah menyebabkan ketegangan antara penduduk Madagaskar dan pemerintah ketika diresmikan di media pada bulan November 2008. Pengumuman proyek ini menciptakan suasana ketidakpercayaan antara penduduk, yang dicurigai pemerintah menjual tanah Madagaskar dalam kondisi yang kurang transparan.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Anonim. tanpa tahun. *Les comptes de fait de Marc Ravalomanana* (Hal yang dilakukan oleh Marc Ravalomanana) [diakses pada tanggal 20 January 2014] dari <http://www.madagate.com/madagascar-informations-politiques-malagasy-photos-madagascar/a-la-une-de-madagascar/madagate-video-et-affiche/849-les-comptes-de-fait-de-marc-ravalomanana.html>

<sup>24</sup> Ariary adalah mata uang Madagaskar. 1 EUR = 3202,32 Ariary.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

Jadi, pemimpin Marc Ravalomanana ini hadir dalam bisnis di semua sektor termasuk makanan, produk minyak bumi, kemasan, perhotelan dan lain lain.

Pembangunan ekonomi Madagaskar di masa Ravalomanana lebih banyak difokuskan kepada upaya untuk menarik investasi asing atau dipanggil 'Program Madagascar Action Plan'(MAP). MAP adalah salah satu program yang dianut oleh Ravalomanana di mana tujuannya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan masalah pangan serta untuk mendapat investor asing dan akan memastikan "langkah maju yang signifikan" untuk menjadi bangsa yang maju dan berdaya saing tinggi.<sup>27</sup> MAP ini adalah bukan memajukan tapi sebaliknya. Program MAP diluncurkan pada akhir tahun 2006, lebih tepatnya, secara resmi diluncurkan pada 10 November 2006 oleh Presiden Republik Madagaskar. MAP ini dirancang untuk jangka waktu lima tahun, 2007-2011 untuk mencapai tujuan yang diharapkan pada tahun 2012. Presiden Ravalomanana membuka negaranya untuk investor asing di bidang pertambangan batubara dan minyak bumi juga. Sebagian orang menentang kebijakan pemerintah ini karena sebagian besar investasi justru tidak dirasakan penduduk Madagaskar. Bahkan rakyat Madagaskar menyatakan Ravalomanana adalah seorang diktator yang menguasai negara seperti perusahaan sendiri dan pemerintahanya bisa merupakan proses politik yang tidak demokratis. Kita tahu bahwa semakin banyak investor yang masuk, hutang juga semakin membesar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pembangunan yang dicapai berasal dari hutang-hutang luar negeri yang jumlahnya juga semakin besar untuk menutupi defisit. Oleh karena itu hutang Madagaskar selama kepemimpinan Ravalomanana akan sangat besar<sup>28</sup>.

Berikut adalah tabel yang akan membantu untuk mengetahui hutang luar negeri Madagaskar:

---

<sup>27</sup> Anonim. tanpa tahun. *Marc Ravalomanana, President de 2002 a 2009*, Dari <http://www.madagascarica.com/ravalomanana.html> [diakses pada tanggal 20 January 2014]

<sup>28</sup> *Ibid.*



**Tabel 3.4** Hutan luar negeri (milliards US\$)

<b>Tahun</b>	<b>Hutan Luar Negeri (milliards US\$)</b>
2002	4.5
2003 -2008	4.6
2009	2.12

Sumber: Dette extérieure (milliards US\$), CIA World Factbook dari <http://www.indexmundi.com> [diakses pada tanggal 20 January 2014]

Investasi asing yang masuk ke Madagaskar cukup besar terutama pada tahun 2008, sebelum Marc Ravalomanana di kudeta pada tahun 2009.<sup>29</sup> Investasi tersebut dieksplotasi sama Marc Ravalomanana untuk memotori industri-industri miliknya. Hal yang menunjukkan juga bahwa dia adalah bertindak monopoli dengan adanya diinjinkannya perusahaan raksasa asal Korea Selatan yaitu Daewoo menyewa lahan yang sangat luas untuk tujuan produksi *biofuel* dan bahan makanan yang berorientasi ekspor.<sup>30</sup> Hal tersebut menjadi isu yang hangat karena tanah yang disewakan sangat besar. Padahal di sisi lain, 65 persen Madagaskar sudah diancam kelaparan. Yang seharusnya tanah tersebut dilola untuk mensejahtera rakyat. Serta pengambilan tanah orang sipil di daerah Ambatondrazaka dimana daerah tersebut adalah daerah palin produktif beras.

Masyarakat internasional menyatakan bahwa pemilihan presiden yaitu pemilihan Marc Ravalomanana disebut dilaksanakan dengan bebas dan adil. Oleh karena itu, dia mendapat respon yang baik dari donor-donor asing dan sejumlah organisasi internasional. Namun program MAP ini adalah menimbulkan kemiskinan dan masalah pangan. Menurut Richard Marcus, Direktur Program Kajian Internasional di California State University, menyatakan bahwa program Madagaskar Action Plan yang didengungkan oleh Marc Ravalomanana untuk menarik dana asing sebenarnya mampu menaikkan indikator perekonomian,

<sup>29</sup> CIA World Factbook <http://www.theodora.com/wfbcurent/madagascar> [diakses pada tanggal 20 January 2014]

<sup>30</sup> Anonim. tanpa tahun. *The Breadbasket of South Korea: Madagascar* Dari <http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1861145,00.html> [diakses pada tanggal 20 January 2014]

namun pada intinya kurang berhasil menaikkan derajat rakyat kelas bawah di Madagaskar.<sup>31</sup>

### 3.2.3 Kebijakan di bidang Pers

Selain media penyiaran nasional yang sudah tersedia bagi Presiden dan anggotanya, Presiden Ravalomanana sendiri menguasai jaringan penyiaran di Madagaskar, baik televisi maupun Radio. Buktinya adalah Ravalomanana menjalankan terlihat pada bisnis media yaitu jaringan penyiaran terbesar di Madagaskar yang bernama *Madagascar Broadcasting System* (MBS) merupakan miliknya.<sup>32</sup> Selain itu dia memiliki radio yang bernama Mada Radio dimana radio tersebut hanya ada di Ibukota Antananarivo, alasan mendirikan radio khusus buat ibukota adalah karena Presiden sendiri berasal dari Ibukota Negara. Juga dia memiliki Radio Rohani yang bernama Radio Fahazavana. Bebrapa surat kabar juga dimiliki oleh Marc Ravalomanana yaitu surat kabar “Le Quotidiens (Daily)” dan “Ny vaovaontsika”. Sedangkan dalam bidang percetakan ada yang namanya “MBS impremerie” dan “Blue Print”. Sangat ironis memang, ketika sebagian besar rakyatnya akan mengalami krisis pangan. Ravalomanana justru banyak mengeruk keuntungan dari perusahaan-perusahaanya di berbagai bidang.<sup>33</sup> Terlihat dari dominasi bebrapa media, Ravalomanana sendiri sangat ketat jika penyiaran lain lebih maju, lebih dihormati, lebih didengar oleh rakyat Madagaskar. Oleh karena itu, dia menutupi jaringan televisi dan radio Viva milik Andry Rajoelina pada tanggal 23 Desember 2008. Hal ini dilakukan karena pemerintah menganggap bahwa televisi Viva telah melakukan pidato tidak sah, yaitu menyiarkan pidato mantan Presiden Didier Ratsiraka yang berisi tentang kritikan terhadap pemerintah Ravalomanana. Hal tersebut telah tertulis dalam konstitusi menyatakan bahwa kebebasan bersuara adalah salah satu hak warga

---

<sup>31</sup> Anonim. tanpa tahun. *MADAGASCAR: Deconstructing a crisis: Part One*. [diakses pada tanggal 20 January 2014] Dari <https://www.google.com/#psj=1&q=Madagascar:+deconstructing+a+crisis%3Apart+one>

<sup>32</sup> Anonim. tanpa tahun. *Country Profile: Madagascar* [diakses pada tanggal 20 January 2014]

<sup>33</sup> *Ibid.*

Madagaskar, baik seorang politisi maupun orang sipil baik itu di pres maupun dalam satu asosiasi dan lain lain.<sup>34</sup>

### 3.2.4 Kebijakan di bidang Militer

Presiden adalah merupakan pimpinan tertinggi militer. Oleh karena itu Presiden Ravalomanana sangat mempunyai hak yang cukup besardi bidang militer. Tugas militer adalah jelas, yaitu sebagai badan penjaga pertahanan dan keamanan negara. Jadi militer cenderung lebih mengutamakan kepentingan nasional. Sedangkan pada masa jabatan Ravalomana, hak-hak mereka terbatas sehingga hal tersebut akan mengganggu nasionalis mereka. Juga tindakan Presiden yang justru mengutamakan kepentingan pribadi sangat tidak sah menurut mereka. Meskipun Presiden adalah pemimpin tertinggi militer tapi militer sendiri harus mempunyai tempat yang luas serta kebebasan untuk gerak. Terlihat pada tanggal 19 february 2008 (pasca terjadinya bencana alam di Madagaskar) Presiden Marc Ravalomanana memakai pakaian militer padahal para prajurit sejati seperti Jenderal Charles Rabemananjara (Perdana Menteri) dan Jenderal Marcel Ranjeva (Menteri Dalam Negeri), dan Kolonel Pily Gilbain (Menteri Luar Negeri) berada dalam pakaian sipil dimana Presiden Ravalomanana sendiri tidak memiliki pengalaman militer. Hal tersebut mencerminkan bahwa dia adalah mendominasi di bidang militer juga.<sup>35</sup>

Hal yang paling mengkawahtirkan militer juga adalah dengan adanya tentara bayaran yang dipesan oleh Presiden Marc Ravalomanana. Tentara bayaran tersebut adalah berasal dari luar negeri seperti Belanda dan Israel. Dimana mana tentara-tentara ini terlibat dalam penembakan para demonstiran pada tanggal 7 february 2009. Hal ini adalah bukti bahwa presiden tidak bisa mengurus pemerintahanya dan juga ini adalah salah satu bukti bahwa Pemerintah sudah tidak percaya lagi kepada militer di Madagaskar.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Anonim. tanpa tahun. *Nouveau look pour Marc Ravalomanana* (New look by Marc Ravalomanana) dikutip dari <http://www.madagate.com/politique-madagascar/analyse/351-nouveau-look-pour-marc-ravalomanana.html> [diakses pada tanggal 25 January 2014]

Hal tersebut menimbulkan kemarahan pada militer, dimana militer yang sudah berusaha dan dikatakan punya rasa nasionalis tidak dipercaya lagi sama pemimpin.

### **3.3 Munculnya Pihak oposisi**

Andry Rajoelina (mantan disk jockey dikenal sebagai "Andry TGV") menjadi walikota di ibukota pada Desember 2007(pada masa jabatan Presiden Marc Ravalomanana). Pada tahun 2008 pemerintah Ravalomanana diduga menyalahgunakan disbursal dana untuk berbagai proyek infrastruktur pemerintah lokal di ibukota, investasi dialihkan jauh dari kota, dan dalam berbagai cara lain menolak untuk memfasilitasi kerjasama antara pemerintah pusat dan kotamadya. Pendukung Rajoelina mengklaim upaya ini dimaksudkan untuk merusak Walikota. Rajoelina juga berniat mengurangi pengaruh TIM (Tiako I Madagasikara) partai dipimpin oleh Prseiden Marc Ravalomanana karena diduga mencampur adukan kepentingan pribadi dan urusan Negara. Kemudian, terjadi krisis politik di Madagaskar pada Desember 2008, ketika pemerintah Ravalomanana menutup Viva TV milik walikota Andry setelah ditayangkan sebuah pidato yang disampaikan oleh mantan Presiden Ratsiraka. Pemerintah menyatakan bahwa pidato tersebut dapat mengancam, mengganggu ketertiban umum dan keamanan, sementara para kritikus melihat gerakan tersebut sebagai tanda untuk meningkatkan intoleransi pemerintah Ravalomanana terhadap media oposisi dan sebagai upaya untuk membatasi pengaruh Rajoelina. Setelah penutupan saluran TV tersebut, Rajoelina mengumumkan sebuah ultimatum untuk menuntut kepentingan kebebasan pers dan demokrasi dan akhirnya pemerintah membiarkan pembukaan Viva TV dan Stasiun lainnya pada tanggal 13 Januari 2009. Pada pertengahan Januari 2009, Rajoelina memprakarsai adanya pertumbuhan gelombang demonstrasi anti-pemerintah Antananarivo. Oleh karena kejadian tersebut, Andry Rajoelina dan pendukungnya menjadi pihak oposisi pemerintah.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

### 3.3.1 Protes masyarakat Madagaskar

Protes anti-pemerintah juga didorong oleh ketidakpuasan atas kondisi ekonomi, tuduhan korupsi pemerintah, tuduhan negara membatasi kebebasan berekspresi, dan dominasi politik partai TIM semakin berkembang. Masyarakat juga sudah bosan dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial. Rajoelina menganggap Ravalomanana seorang diktator dan menyerukan lebih lanjut gerakan anti-pemerintahan, pemogokan. Pada akhir Januari protes masyarakat berubah menjadi kekerasan, massa mengamuk dan melakukan penjarahan.

Pada akhir Januari Rajoelina didukung oleh sekelompok partai-partai oposisi dan sebagian masyarakat Madagaskar untuk menurunkan Ravalomanana dan berencana membentuk dua tahun transisi demokrasi yang akan dia pimpin. Pada tanggal 3 Februari 2009, Ravalomanana mencabut jabatan Rajoelina dari kantor walikota. Rajoelina terus menuntut pembentukan pemerintahan transisi. Masyarakat dan pendukung Rajoelina terus berkumpul untuk mendukung perjuangan mereka.<sup>37</sup>

### 3.3.2 Keterlibatan militer

Militer Madagaskar menyatakan sikap netral selama krisis politik yang terjadi pada akhir tahun 2008. Selama meningkatnya ketegangan antara Ravalomanana dan Rajoelina, Angkatan bersenjata berulang kali berjanji untuk melindungi penduduk sipil dan menjaga aturan hukum. Faktanya pada awal Maret 2009, militer justru digunakan oleh pemerintah Ravalomanana untuk menekan protes sehingga dalam beberapa kasus mengakibatkan kematian. Tindakan pemerintah Ravalomanana yang melanggar HAM membuat militer memperingatkan bahwa mereka akan mengambil alih kekuatan jika kedua belah pihak yang bertentangan tidak berhasil mengatasi masalah mereka. Selanjutnya, pemimpin militer terlihat semakin bersandar ke arah mendukung Rajoelina karena tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Ravalomanana.

Pada waktu krisis politik terjadi, posisi militer di Madagaskar menjadi dua di mana mayoritas militer mendukung pihak Andry Rajoelina. Ketegangan politik

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

di Madagaskar berlanjut dan diselingi oleh demonstrasi. Militer pendukung Rajoelina juga mengikuti para demonstran dan memakai pakaian sipil. Di sisi lain, militer pendukung Marc Ravalomanana berpakaian seragam militer dan mereka mengancam demonstran agar mereka tidak melakukan demonstrasi. Pada beberapa kesempatan, pasukan keamanan menggunakan gas air mata untuk membubarkan demonstran, dan beberapa demonstran dilaporkan terluka atau cedera. Demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak oposisi semakin memanas sehingga berakibat pada tindakan para militer (pendukung Ravalomanana) yang langsung menembaki para demonstran tanpa peringatan atau penggunaan gas air mata lagi. Selain keinginan masyarakat menurunkan presiden, militer juga mempunyai latar belakang untuk kepentingan mereka yaitu untuk menjadi pejabat negara serta menggantikan para pemimpin pada waktu Presiden Ravalomanana berkuasa. Selain itu, mereka ingin menghentikan dominasi pasukan (bantuan yang diminta oleh Ravalomanana) militer asing di Madagaskar untuk mengembalikan kedaulatan militer lokal.

### **3.4 Krisis Politik tahun 2009**

Pada awal tahun 2009, di ibukota Antananarivo terjadi krisis politik antara Presiden Madagaskar Marc Ravalomanana (yang berkuasa sejak tahun 2002) dengan Andry Rajoelina. Iklim politik yang semakin memburuk di Madagaskar karena pemerintahan Ravalomanana telah melakukan berbagai pelanggaran HAM termasuk menutup akses media TV Viva. Andry Rajoelina secara terbuka menyatakan akan menggulingkan Presiden Ravalomanana yang berkuasa. Tindakan Rajoelina tersebut merupakan *feed back* dari tindakan pemerintah yang menutup saluran televisi Viva TV pada Desember 2008. Krisis semakin membesar pada tanggal 26 Januari 2009 di mana pendukung Andry Rajoelina membakar semua perusahaan milik Ravalomanana dan juga saluran TV yang mendukungnya. Krisis berlanjut dengan demonstrasi yang dilakukan oleh pendukung Andry Rajoelina di mana bentrokan antara kedua belah pihak semakin parah pada 7 Februari 2009. Awalnya Marc Ravalomanana mengundurkan diri karena melihat demonstrasi yang semakin besar. Ravalomanana kemudian